

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA LUBUKLINGGAU DALAM PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV)
TAHUN 2015 DI KOTA LUBUKLINGGAU**



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

YUDA MARIANZA

NIM.500632738

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

ABSTRACT**THE PERFORMANCE EVALUATION OF YOUTH AND SPORTS
DEPARTMENT IN HOLDING THE PROVINCIAL SPORT EVENT
(PORPROV) 2015 IN LUBUKLINGGAU**

Yuda Marianza
ymarianza@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Youth and Sport Department's Performance in organizing on Lubuklinggau PORPROV 2015 event, left common phenomenon that needs to be studied like the implementation of some of the planning of the event that have been defined so accurately, but at the time of execution, some event have not been implemented in the operation or development. The purpose of this study is to describe the role, analyze the supporting and inhibiting factors, as well as the efforts of the Youth and Sports Department Lubuklinggau in evaluating the Provincial Sports Event (PORPROV) 2015 in Lubuklinggau. The data were collected by means of triangulation consisting of observation, documentation, and in-depth interviews. The samples of this study were obtained through purposive sampling. The results of this study show that: Organizational Performance at input aspect swelling budget windfalls, the organization's performance on aspects of the process: all activities on the aspect of the process is working as it should. Organizational performance in the aspect of output: Sports facilities unfinished, the Inn of the athletes and the Official unfulfilled. Suggestions given from this research are: Youth and Sports Department Lubuklinggau should be more selective in doing budgeting for some other event like PORPROV and precision in executing the program from being repeated occurrences and improve their performance in implementing the plan an activity or program that is more accurate and right on target.

Keywords: Performance Evaluation, Provincial Sports Event (PORPROV)

ABSTRAK**EVALUASI KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA
LUBUKLINGGAU DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEKAN
OLAAHRAGA PROVINSI (PORPROV) TAHUN 2015 DI KOTA
LUBUKLINGGAU**

Yuda Marianza
ymarianza@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Lubuklinggau dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 meninggalkan fenomena umum yang perlu diteliti yaitu tidak terlaksananya beberapa perencanaan kegiatan yang sudah ditetapkan sedemikian akurat namun pada saat eksekusi, beberapa kegiatan belum terlaksana dalam penyelenggaraan ataupun pembangunannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan, menganalisis faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dalam mengevaluasi penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau. Data penelitian ini dikumpulkan melalui triangulasi yang meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kinerja Organisasi pada aspek input terjadi pembengkakan anggaran dana tak terduga, Kinerja organisasi pada aspek proses:seluruh kegiatan pada aspek proses sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kinerja organisasi pada aspek *output*: Sarana olahraga yang belum selesai, penginapan para Atlet dan Official yang belum terpenuhi. Saran yang dapat peneliti berikan dari penelitian ini adalah: Dinas Pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau harus lebih selektif lagi dalam melakukan penyusunan anggaran untuk kegiatan PORPROV dan ketepatan dalam mengeksekusi program agar tidak terulang kejadian serta memperbaiki kinerja organisasinya dalam melaksanakan perencanaan suatu kegiatan maupun program yang lebih akurat dan tepat sasaran.

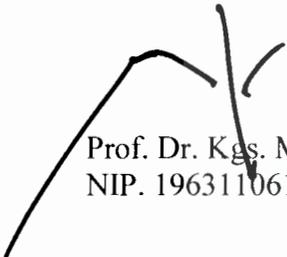
Kata Kunci : Evaluasi Kinerja, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM : Evaluasi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 Di Kota Lubuklinggau

Nama : Yuda Marianza
NIM : 500632738
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Sabtu / 23 Juli 2016

Pembimbing I,


Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II,


Dr. Agus Joko Purwanto, M. Si
NIP. 196605081992031003

Penguji Ahli

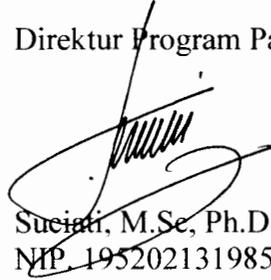

Prof. Dr. Endang Wirjatmi TL, M.Si
NIP. 195410141981032001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Administrasi Publik


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003

Direktur Program Pascasarjana


Sucinti, M.Sc, Ph.D
NIP. 195202131985032001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Yuda Marianza
 NIM : 500632738
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Evaluasi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 Di Kota Lubuklinggau

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu / 23 Juli 2016

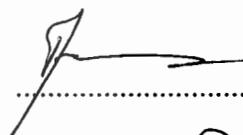
W a k t u : 10:30 Wib

dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji TAPM

Tanda Tangan

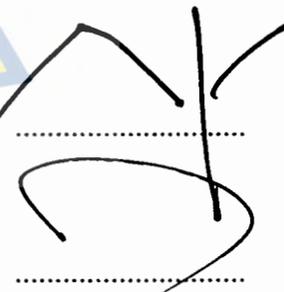
Ketua Komisi Penguji : Dr. Tita Rosita, M.Pd

.....


Penguji Ahli : Prof. Dr. Endang Suyatna, M.Si

.....


Pembimbing I : Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si

.....


Pembimbing II : Dr. Agus Joko Purwanto, M. Si

.....

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Evaluasi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 Di Kota Lubuklinggau** adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang,2016

Yang Menyatakan


UNIVERSITAS TERBUKA
PALEMBANG
1C4AEF123697350


1000
RIBURUPIAH
(Yuda Marianza)
NIM 500632738

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat limpahan dan karunia – Nya yang selalu memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir program magister ini. Penulisan tugas akhir program magister ini merupakan salah syarat untuk memperoleh gelar S.2 pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPPBJ-Palembang . Adapun judul tugas akhir program magister saya ini berjudul “ Evaluasi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 Di Kota Lubuklinggau”.

Saya menyadari selama dalam penyusunan tugas akhir program magister ini penulis banyak sekali mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dalam berbagai bentuk sehingga proses yang penulis jalani berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Kgs M. Sobri, M.Si** *pembimbing I* dan Bapak **Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si** *pembimbing II* yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan dan memberikan motivasi dalam penyusunan tugas akhir program magister ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir program magister ini;
2. Ibu **Prof. Dr. Endang Wiyatmi TL, M.Si** *Penguji Ahli* dan Ibu **Dr. Tita Rosita, M.Pd** *Ketua Komisi Penguji* yang telah memberikan arahan dan masukannya;

3. Bapak **Ir. Adi Winata, M.Si** Ketua Univeristas Terbuka UPPBJ-Palembang, Bapak **Steven Anthoni, M.Si** pengelola pendidikan S2 UPBJJ-Palembang Pokjar Kota Lubuklinggau, dan seluruh pegawai Universitas Terbuka Palembang yang tidak dapat saya sebutkan satu – satu;
4. Kedua orang tua saya (**Damiri Zaini dan Yuniar Fauziah**) dan kedua orang mertua saya (**Tekhasani, HZ, S.Pd.I, MM dan Hayani, S.Pd.I**) atas do`a, kasih sayang, pengorbanan dan motivasinya untuk menyelesaikan studi ini;
5. Istri tercinta saya **Lena Agustini, SKM** yang memberi motivasi dan dukungan baik moril maupun spirit sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir program magister ini;
6. Kedua anak saya yang tercinta dan tersayang, **Raffa Aldino Akbar** dan **Fawwaz Dwi Alfathan** yang selalu menjadi inspirasi membantu dan mendoakan agar studi ini cepat selesai;
7. Dosen Program Magister Administrasi Publik Universitas terbuka yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada penulis;
8. Semua saudara saya kakak, adik yang selalu mendoakan agar cepat menyelesaikan studi ini;
9. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ-Palembang Pokjar Kota Lubuklinggau yang saling membantu dan memberikan pemikiran dalam penyelesaian tugas akhir program magister ini;
10. Para responden yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian; dan
11. Pihak-pihak yang telah memberikan andil terhadap penyelesaian TAPM ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tugas akhir program magister ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan tugas akhir program ini.

Lubuklinggau , Juli 2016

Penulis



BIODATA PRIBADI

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap | YUDA MARIANZA |
| 2 | NIM | 500632738 |
| 3 | Program Studi | Magister Administrasi Publik |
| 4 | Tempat Lahir dan Tanggal Lahir | Palembang, 14 Maret 1978 |
| 5 | Jenis kelamin | Laki - Laki |
| 6 | Agama | Islam |
| 8 | Alamat Rumah | a. Jalan Embacang No. 86.A
b. Kelurahan / Desa Majapahit
c. Kecamatan Lubuklinggau Timur I
d. Kabupaten/Kota Lubuklinggau
e. Provinsi Sumatera Selatan |
- 9 Riwayat Pendidikan :
- Lulus SD di SD Kartika 2 Palembang pada tahun 1990
Lulus SMP di SMPN 2 Palembang pada tahun 1993
Lulus SMA di STM Negeri 2 Palembang pada tahun 1996
Lulus S-1 di Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2002
- 10 Riwayat Pekerjaan :
- Tahun 2005 s/d Tahun 2006 sebagai staf Kecamatan Lubuklinggau Utara I di Lubuklinggau
 - Tahun 2006 s/d Tahun 2007 sebagai staf Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Lubuklinggau
 - Tahun 2007 s/d Juni 2008 sebagai staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau
 - Tahun 2008 s/d September 2008 sebagai staf Kecamatan Lubuklinggau Utara II di Lubuklinggau
 - Tahun 2008 s/d Januari 2015 sebagai Kasi Pembangunan Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur 2 di Kota Lubuklinggau
 - Tahun 2015 s/d sekarang sebagai Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau

Demikian biodata pribadi ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil pemerintah.

Lubuklinggau, Juli 2016

Mahasiswa

Yuda Marianza
NIM 500632738

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Pengesahan Ujian Sidang TAPM	iii
Lembar Persetujuan Kelayakan Ujian Sidang TAPM.....	iv
Surat Pernyataan Anti Plagiat	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	8
1. Evaluasi	8
2. Kinerja Organisasi.....	11
3. Evaluasi Kinerja	13
4. Fungsi Evaluasi	20
5. Pengertian Kinerja.....	21
6. Pengertian Evaluasi Kinerja	23
7. Fungsi Evaluasi Kinerja	25
8. Sasaran Evaluasi Kinerja.....	27
9. Tujuan Evaluasi Kinerja.....	28

10. Manfaat Pengukuran Kinerja Publik	30
11. Indikator Kinerja Organisasi	31
12. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi.....	36
13. Bentuk Evaluasi Kinerja Dari Segi Pelaksanaan Kegiatan	38
14. Evaluasi Kinerja Kegiatan dan sasaran	38
B. Penelitian Terdahulu.....	40
C. Kerangka Berpikir	46
D. Operasionalisasi Konsep	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	50
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	52
C. Instrumen Wawancara.....	53
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Analisis Data	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	56
1. Gambaran Umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau	56
2. Visi Organisasi	56
3. Misi Organisasi	57
B. Hasil Penelitian.....	57
C. Pembahasan	60
1. Kinerja organisasi pada aspek <i>Input</i>	61
2. Kinerja organisasi pada aspek <i>Proses</i>	63
3. Kinerja Organisasi pada aspek <i>Output</i>	83
4. Aspek <i>Outcome</i>	83
5. Aspek <i>Benefit</i>	85
6. Aspek <i>Impact</i>	85
7. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kinerja Penyelenggaraan Kegiatan PORPROV Tahun 2015 Di Kota Lubuklinggau.....	87

8. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Penghambat Dalam Penyelenggaraan Kegiatan PORPROV Tahun 2015	93
--	----

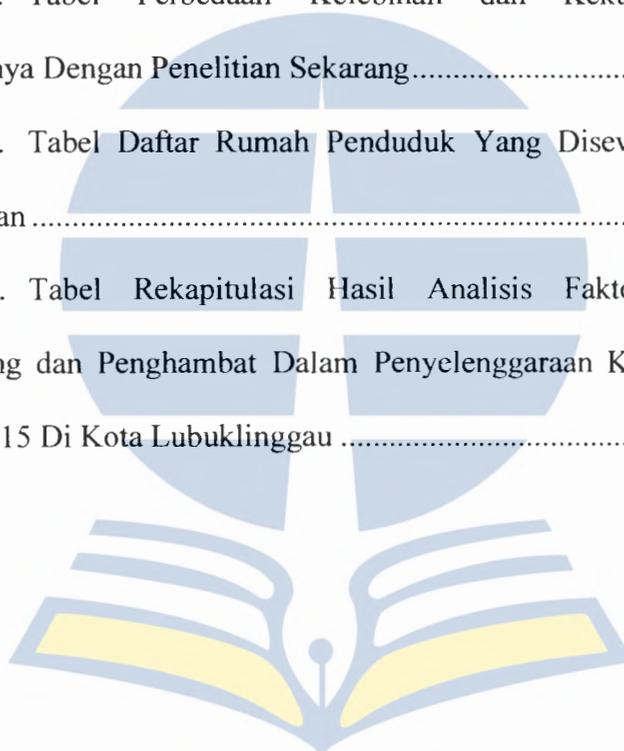
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	106



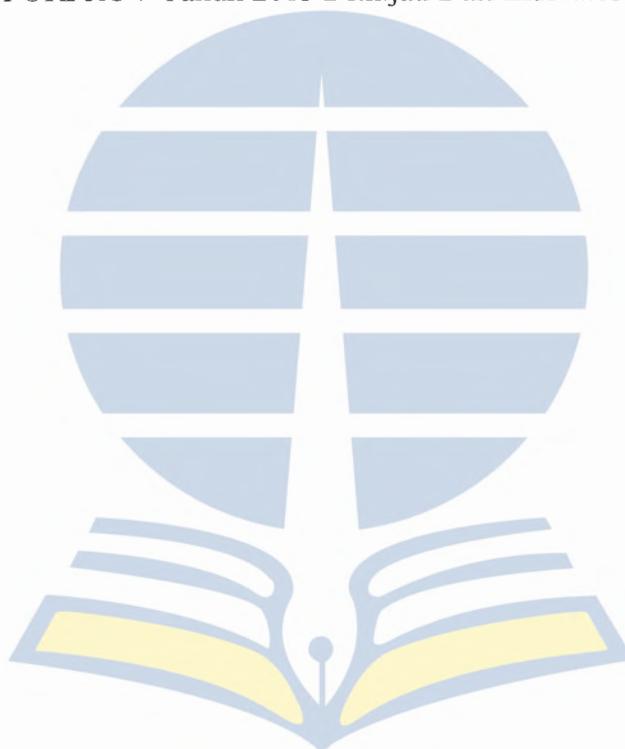
DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1. Tabel Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan PORPROV Tahun 2015.....	4
2. Tabel 2.1. Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang	41
3. Tabel 2.2. Tabel Perbedaan Kelebihan dan Kekurangan Penelitian Sebelumnya Dengan Penelitian Sekarang.....	45
4. Tabel 4.1. Tabel Daftar Rumah Penduduk Yang Disewa Sebagai Tempat Penginapan	96
5. Tabel 4.2. Tabel Rekapitulasi Hasil Analisis Faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Dalam Penyelenggaraan Kegiatan PORPROV Tahun 2015 Di Kota Lubuklinggau	99



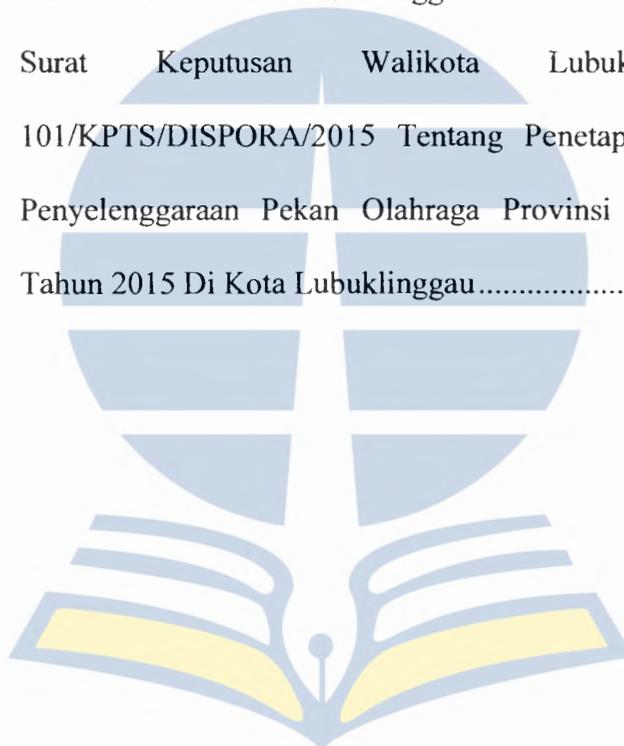
DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1. Gambar Kerangka Organisasi 36
2. Gambar 2.1. Gambar Kerangka Berpikir..... 46
3. Gambar 4.1. Gambar Arsip dan Dokumen Dispora Kota Lubuklinggau 95
4. Gambar 4.5 Gambar Kinerja Dispora Kota Lubuklinggau Dalam Pelaksanaan Kegiatan PORPROV Tahun 2015 Ditinjau Dari Indikator Kinerja..... 98



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 48 Tahun 2014.....	106
Lampiran 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Tentang Anggaran Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 Di Kota Lubuklinggau.....	106
Lampiran 3. Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor: 101/KPTS/DISPORA/2015 Tentang Penetapan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Ke-X Tahun 2015 Di Kota Lubuklinggau.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak diberlakukannya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah banyak membawa perubahan khususnya paradigma dalam pengelolaan daerah. Perubahan itu antara lain dengan adanya pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan. Tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah untuk menuntut kemandirian kesiapan, serta memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan juga meringankan beban pemerintah pusat dari segala tugas-tugas yang dinilai tidak perlu karena lebih efektif dan efisien jika dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah pusat lebih lebih terfokus untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang dilaksanakan oleh daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan diambil.

Ditinjau dari aspek sosial, terdapat ragam masalah yang kemudian sering terabaikan dari kacamata kebijakan pemerintah daerah. Masalah-masalah tersebut yaitu kurangnya upaya yang serius untuk mengurangi pengaruh sosial yang mengungkung masyarakat dalam kondisi kemiskinan struktural, apalagi jika lebih diperparah dengan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan serta informasi yang digunakan untuk kemajuan masyarakat. Masalah-masalah tersebut ditambah dengan kurangnya berkembang kelembagaan

masyarakat dan organisasi sosial yang merupakan sarana untuk melakukan interaksi serta memperkuat ketahanan dan perlindungan bagi masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk senantiasa mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi dalam masyarakat dalam wilayah otoritasnya, agar pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik baik dalam aspek pembangunan ekonomi sosial maupun politik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Permasalahan keolahragaan baik tingkat Nasional maupun daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang tersebut, memperhatikan asas desentralisasi, otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara

sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.

Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) tahun 2015 dilaksanakan di Kota Lubuklinggau, pelaksanaan PORPROV di Kota Lubuklinggau merupakan pelaksanaan pertama yang diselenggarakan diluar Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan PORPROV tahun 2015 telah sukses dilaksanakan, hal ini tidak terlepas dari peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau yang ikut serta menyukseskan PORPROV tahun 2015.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau sesuai peranan dan fungsinya berperan penting dalam menyukseskan kegiatan PORPROV tahun 2015. Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pemuda dan olahraga serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi maka sudah semestinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau ikut serta melaksanakan PORPROV di Kota Lubuklinggau. Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Lubuklinggau juga melaksanakan program kerja yang disusun yaitu pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Kota Lubuklinggau serta melaksanakan pengawasan yang profesional dalam mendukung terselenggaranya kegiatan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau.

Kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Lubuklinggau dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 meninggalkan fenomena umum yang perlu diteliti yaitu tidak terlaksananya beberapa perencanaan kegiatan yang sudah ditetapkan sedemikian akurat namun pada saat eksekusi, beberapa kegiatan belum terlaksana dalam penyelenggaraan ataupun pembangunannya. Adapun kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kendala yang dihadapi Dalam Pelaksanaan PORPROV Tahun 2015

No	Masalah	Pelaksanaan Kegiatan
1	dua <i>venue</i> yang terhambat penyelesaiannya	Lapangan futsal dan lapangan tembak yang terhambat penyelesaiannya hal ini berdampak kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan, sarana yang dibuat belum 100% selesai sehingga terasa kurang nyaman peserta dalam mengikuti pertandingan
2	Belum tersedianya gedung cabang Olahraga <i>Bilyard</i> dan Karate	cabang olahraga bilyard dan karate yang pelaksanaannya masih menyewa gedung Bagasraya Yadika
3	Penginapan para Atlet dan <i>Offical</i> yang belum terpenuhi	penginapan para Atlet dan <i>Offical</i> dari 17 Kabupaten/Kota yang belum bisa terpenuhi sehingga harus menyewa rumah penduduk untuk tempat menginap para kontigen tersebut

Sumber: Data Skunder Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa belum optimalnya kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dalam mengeksekusi rencana

kegiatan dalam menyukseskan PORPROV tahun 2015. Evaluasi dalam pelaksanaan PORPROV tahun 2015 ini sangat diharapkan demi perbaikan dalam menghadapi kegiatan-kegiatan akbar lainnya.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa fenomena-fenomena ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan dengan apa yang direalisasikan sering terjadi. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Wendy Setiawan (2014) dengan tema penelitian 'Evaluasi Kinerja Proyek dengan Pendekatan *Weibullized-Earn Value*'. Hasil penelitian yang didapat oleh Wendy adalah perkiraan waktu penyelesaian proyek (*Time Estimated*) adalah 108 hari namun kinerja proyek sedikit mengalami mundur daripada yang direncanakan yaitu selama 97 hari. Penelitian yang dilakukan oleh Sudjarwo (2008) mengenai 'evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV pada Balai Diklat Keagamaan Semarang'. Hasil yang diperoleh Sudjarwo yaitu kinerja inputs unsur Sarana dan Prasarana (*hardware*) pendukung dalam pelayanan akademik pada Diklatpim IV meliputi aspek-aspek yang dicapai yaitu: capaian kinerja kelas 62,35% (Kurang). Capaian kinerja perpustakaan 83,33% (Sedang). Capaian kinerja sarana olah raga 80% (Sedang). Capaian Poliklinik 71,42% (Sedang). Capaian kinerja asrama 75% (Sedang). Jadi rata-rata capaian kinerja sarana prasarana adalah 72,02% (Sedang). Hal-hal yang disarankan oleh peneliti terdahulu ini yaitu pembinaan oleh atasan langsung dengan menjalin komunikasi verbal dan non verbal secara intensif serta pengawasan melekat melalui koordinasi internal secara rutin.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **evaluasi kinerja dinas pemuda dan olahraga kota**

lubuklinggau dalam penyelenggaraan kegiatan pekan olahraga provinsi (PORPROV) tahun 2015 di kota lubuklinggau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat oleh peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) tahun 2015 di Kota Lubuklinggau ?
2. Faktor apakah yang menghambat ketercapaian target dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) tahun 2015 di Kota Lubuklinggau.
2. Menganalisis faktor yang menghambat ketercapaian target dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

- a. Praktis, dari hasil penelitian ini kemudian dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pelaksanaan program pemerintah daerah Kota Lubuklinggau dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- b. Akademis:

1. Dapat memberikan tambahan teori/literatur dalam studi pemberdayaan masyarakat bidang olahraga dengan sinkronisasinya terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat berfikir secara analisis dan dinamis di masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penilaian kinerja pegawai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Evaluasi

Evaluasi adalah “penilaian” (Tim Balai Pustaka, 1989). Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia dalam Suharso, (2005) evaluasi diartikan sebagai menentukan nilai. Pengertian evaluasi dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) edisi kedua dalam Sudjarwo (2008), disebutkan bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*).

Evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu : fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau dan dualitas nilai

- a. **Fokus Nilai.** Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
- b. **Interdependensi Fakta Nilai.** Suatu hasil evaluasi tergantung kepada “fakta/bukti” dan “nilai”. Untuk memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau

minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat, haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi evaluasi.

- c. **Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.** Evaluasi diarahkan pada hasil saat ini dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang. Evaluasi bersifat *retrospektif*, dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan (*ex-post*). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan (*ex-ante*).
- d. **Dualitas Nilai.** Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai *intrinsik* (diperlukan bagi dirinya) ataupun *ektrinsik* (diperlukan karena kesehatan mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain) (LAN RI dalam Sudjarwo, 2008).

Istilah evaluasi menurut Sondang Siagian dalam Sudjarwo (2008) diartikan sebagai penilaian, yaitu proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa hakekat dari penilaian itu adalah :

- 1) Penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Sedangkan pengawasan ditujukan kepada fase yang masih dalam proses pelaksanaan. Secara sederhana dapat dikatakan dengan selesainya pekerjaan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya berlaku bagi tugas yang sedang dilaksanakan.
- 2) Penilaian bersifat korektif terhadap fase yang telah selesai dikerjakan. Korektifitas yang menjadi sifat dari penilaian sangat berguna bukan untuk fase yang telah selesai, tetapi untuk fase berikutnya. Artinya, melalui penilaian harus dikemukakan kelemahan-kelemahan sistem yang dipergunakan dalam fase yang baru saja diselesaikan. Juga harus dikemukakan penyimpangan - penyimpangan dan / atau penyelewengan / penyelewengan yang telah terjadi. Tetapi lebih penting lagi harus dikemukakan sebab-sebab mengapa penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan itu terjadi.
Bahan yang sangat berguna untuk dipergunakan pada fase berikut sehingga kesalahan yang terjadi pada fase yang baru diselesaikan tidak terulang, sehingga dengan demikian organisasi tumbuh dan berkembang dalam bentuk tingkat "performance" yang lebih tinggi dan efisien dan inefisiensi yang semakin berkurang.
- 3) Penilaian bersifat "*prescriptive*" yaitu bersifat "mengobati". Setelah kelemahan sumber-sumber yang menyebabkan mungkinya penyimpangan dan/atau penyelewengan terjadi yang terdapat pada system pelaksanaan dalam fase yang lalu diketemukan melalui

penilaian, maka selanjutnya harus diberikan rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan pada setiap fase agar tidak terulang kembali dan mencegah terjadinya kelemahan yang baru.

- 4) Penilaian difokuskan kepada fungsi organik. Fungsi administrasi dan manajemen itu tidak merupakan fungsi yang “berdiri sendiri”. Melainkan fungsi organik administrasi dan manajemen itu merupakan satu rantai kegiatan dan masing-masing fungsi itu merupakan mata rantai yang terikat kepada semua mata rantai yang lain. (Siagian dalam Sudjarwo, 2008).

Menurut peneliti evaluasi adalah proses membandingkan antara standar yang berisi indikator kerja pada setiap kegiatan dengan kegiatan yang terlaksana.

2. Kinerja Organisasi

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2006:25). Kinerja bisa juga dapat dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Bernandin dan Russell dalam Iswanto (2005) mengemukakan bahwa kinerja didefinisikan sebagai catatan *outcomes*, yang dihasilkan pada fungsi atau aktifitas pekerjaan tertentu selama periode waktu yang tertentu pula. Kinerja (*performance*) dalam kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, diartikan : pertunjukan, pagelaran, perbuatan, daya guna, prestasi, pelaksanaan, penyelenggaraan, pagelaran (Gunawan dalam Sudjarwo, 2008). *Performance Standard* artinya penilaian prestasi, dan standar-standar pekerjaan (Moekijat dalam Sudjarwo, 2008). Yaslis Ilyas dalam Winarni.ED dalam Sudjarwo (2008) yang dimaksud dengan kinerja adalah penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Menurut Thomas C. Ale Winl dalam A. Dale Timpe, penyusunan standar kerja yang bersumber mengkaji kinerja kerja karyawan (Ale Winl dalam Sudjarwo, 2008).

Iswanto (2005) menyebutkan bahwa hasil dari kinerja adalah produktifitas bagi organisasi dan penghargaan bagi individu/karyawan yang berupa upah, tunjangan, keamanan pekerjaan, pengakuan dari teman kerja dan supervisor, serta peluang promosi. Dalam hal ini kinerja dapat merupakan standar pelayanan yang akan diberikan kepada pelanggan. Muhellis (2006) menyebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penyediaan Standar Pelayanan Publik yaitu terjaminnya ketersediaan kebutuhan pelayanan data dan informasi, terdapat batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pelayanan/penyelenggaraan.

Penilaian kinerja menurut Iswanto (2005) adalah bahwa suatu fungsi harus dievaluasi dengan kerja yang dilaksanakan, bukan karakteristik orang

yang melaksanakan. Sehingga kinerja dalam penelitian ini adalah tingkat capaian prestasi dari suatu program atau kegiatan tertentu dari tugas penyelenggaraan.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa kinerja organisasi adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan program/kebijakan/ visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para instansi sering tidak memperhatikan kinerja instansi atau organisasi kecuali kinerja sudah amat buruk. Kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, diperlukan beberapa informasi tentang kinerja organisasi. informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini, sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Faktanya, banyak organisasi tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya.

3. Evaluasi Kinerja

Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut

dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608). Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik.

Adapun menurut Ndraha, (1989:201) berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Menurut *Commonwealth of Australia Department of Finance* Evaluasi biasanya didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Secara umum, evaluasi dapat didefinisikan sebagai *the systematic assessment of the extent to which:*

1. *Program inputs are used to maximise outputs (efficiency);*
2. *Program outcomes achieve stated objectives (effectiveness);*

3. *Program objectives match policies and community needs (appropriateness).*

(Commonwealth of Australia Department of Finance, 1989: 1)

Menurut pendapat diatas, evaluasi adalah penilaian secara sistimatis untuk melihat sejauh mana efisiensi suatu program masukan (*input*) untuk memaksimalkan keluaran (*output*), evaluasi juga digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian hasil atau afektifitas, dan kesesuaian program kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan.

Sudarwan Danim mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah:

“Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai” (Danim, 2000:14).

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana, sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di

dalamnya. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. (Dunn, 2003:608-609)

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti-bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi (Iswanto, 2005:5). Selanjutnya Fisher et al dalam Iswanto (2005:5) menyatakan bahwa penelitian kinerja merupakan proses dimana kontribusi karyawan terhadap organisasi selama periode tertentu dinilai.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan Pengukuran Kinerja dan pengembangan indikator kinerja. Oleh karena itu dalam melakukan Evaluasi Kinerja harus berpedoman pada ukuran dan indikator yang telah ditetapkan bersama (Kosasih dalam Sudjarwo, 2008)

Evaluasi Kinerja merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan satuan organisasi/kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi Kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya agar dikaitkan dengan sumber daya (*inputs*) yang berada dibawah wewenangnya seperti SDM, dana/keuangan, sarana/prasana, metode kerja dan hal lain yang berkaitan. (Kosasih dalam Sudjarwo, 2008).

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan dan sasaran, mengevaluasi program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan mengevaluasi secara menyeluruh sehingga akhirnya dapat disimpulkan kinerja organisasi. (LAN dalam Sudjarwo, 2008).

Evaluasi terhadap kegiatan instansi adalah bentuk paling kecil dari evaluasi kinerja organisasi. Evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh atau sebagian kegiatan menurut prioritas manajemen instansi. Tingkat pentingnya evaluasi sangat ditentukan oleh tingkat pentingya kegiatan itu sendiri. Jika

kegiatan tersebut merupakan kegiatan pokok atau kegiatan utama yang merupakan ciri organisasi instansi dalam pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang cukup dominan dalam rangka menjalankan misi instansi, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan itu adalah penting.

Terdapat tiga pilihan yang berkaitan dengan isi kinerja untuk dinilai menurut Iswanto (2005:20) yaitu fokus penilaian, aspek nilai dan jangkar level kinerja.

- a) **Fokus nilai.** Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, kebijakan, program maupun kegiatan. Penilaian juga dapat berorientasi pada person (berfokus pada orang yang melaksanakan suatu perilaku) dapat pula berorientasi pada pekerjaan (fokus pada rekor outcome). Penilaian yang efektif adalah yang berfokus pada outcome, yaitu yang berhubungan langsung dengan misi dan sasaran organisasi. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
- b) **Aspek nilai.** Agar suatu kegiatan penilaian terhadap kinerja efektif maka perlu menentukan batasan penilaian terhadap fungsi pekerjaan, penilaian harus menilai setiap kriteria kinerja yang relevan untuk setiap pekerjaan secara terpisah. Menurut Bernardin dan Russel dalam Iswanto (2005:5.21), menyatakan paling sedikit ada enam kriteria dimana nilai kinerja suatu aktifitas kerja tertentu dapat dinilai, yaitu :

- 1) Kualitas. Tingkat seberapa sempurna suatu hasil melaksanakan suatu pendekatan aktifitas baik yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap suatu cara pelaksanaan aktifitas yang ideal atau memenuhi tujuan aktifitas yang diharapkan
 - 2) Kuantitas. Jumlah yang dihasilkan, yang tercermin dalam satuan
 - 3) Ketepatan batas waktu. Tingkat seberapa sempurna/lengkap suatu aktifitas diselesaikan atau menghasilkan produk pada waktu tercepat dari waktu yang diinginkan baik yang dilihat dari koordinasi dengan keluaran lain maupun dari maksimasi waktu yang tersedia bagi aktifitas lain.
 - 4) Keefektifan biaya. Tingkat seberapa maksimum penggunaan sumber daya organisasi (manusia, uang, teknologi, dan material) dalam kaitannya untuk mencapai keuntungan paling tinggi atau mengurangi kerugian pada setiap unit atau instansi yang menggunakan sumber daya.
 - 5) Kebutuhan terhadap supervisi. Tingkat seberapa perlu, karyawan yang dinilai terhadap bantuan atau supervisi dalam rangka menyelesaikan fungsi pekerjaannya.
 - 6) Dampak interpersonal. Tingkat seberapa meningkat perasaan percaya diri, nama baik, dan kekooperatifan diantara mitra kerja dan bawahannya.
- c) **Jangkar Level Kinerja (*Performance-level anchor*)**. Sistem penilaian berorientasi pada pekerjaan secara khusus menuntut penilaian untuk membandingkan kinerja pada setiap fungsi pekerjaan dengan seperangkat tolok ukur (*benchmarks*). Tolok ukur tersebut menurut Bernardin dan Russel dalam Iswanto (2005) terdiri dari tiga bentuk yang berbeda yaitu : ajektif atau

frase ajektif, deskripsi keprilakuan atau insiden kritis, dan outcomes atau produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan.

Kedalaman dari evaluasi kegiatan ditentukan oleh manajemen atau pimpinan unit organisasi. Peran penanggung jawab kegiatan dalam menentukan evaluasi terhadap kegiatan sangat penting. Jika penanggung jawab kegiatan merasa perlu atau sadar akan kewajibannya tentulah evaluasi terhadap kegiatan dilakukan. Jika evaluasi ditujukan untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan tentulah diperlukan evaluasi yang mendalam.

4. Fungsi Evaluasi

Evaluasi mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. Memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu.
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- c. Memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan

alternatif kebijakan yang lain. (Tim Penyusun Modul Sistem AKIP;2007)

Menurut pendapat di atas, fungsi evaluasi untuk memberi informasi yang baik dan benar, kepada masyarakat. Memberi kritikan pada klarifikasi suatu nilai-nilai dari suatu tujuan dan target, kemudian Membuat suatu metode kebijakan untuk mencapai kinerja sehingga program dan kegiatan yang di evaluasi memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan suatu kegiatan dalam organisasi atau instansi.

5. Pengertian Kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Notoatmodjo bahwa kinerja tergantung pada kemampuan pembawaan (*ability*), kemampuan yang dapat dikembangkan (*capacity*), bantuan untuk terwujudnya *performance* (*help*), insentif materi maupun nonmateri (*incentive*), lingkungan (*environment*), dan evaluasi (*evaluation*). Kinerja dipengaruhi oleh kualitas fisik individu (ketrampilan dan kemampuan, pendidikan dan keserasian), lingkungan (termasuk insentif dan noninsentif) dan teknologi.

Definisi kinerja menurut Mangkunegara (2012) adalah :

“Kinerja Karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Berdasarkan definisi di atas maka

disimpulkan bahwa kinerja Sumber Daya Manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik kaulitas maupun kuantitas yang dicapai Sumber Daya Manusia persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Mangkunegara dalam bukunya Evaluasi Kinerja SDM (2005:20) manajemen kinerja merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan dikomunikasikan secara terus menerus oleh pimpinan kepada karyawan, antara karyawan dengan atasannya langsung. Selanjutnya Mangkunegara mengemukakan tujuan dari pelaksanaan manajemen kinerja, bagi para pimpinan dan manajer adalah :

- a. Mengurangi keterlibatan dalam semua hal;
- b. Menghemat waktu, karena para pegawai dapat mengambil berbagai keputusan sendiri dengan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang benar
- c. Adanya kesatuan pendapat dan mengurangi kesalahpahaman diantara pegawai tentang siapa yang mengerjakan dan siapa yang bertanggungjawab;
- d. Mneurangi frekuensi situasi dimana atasan tidak memiliki informasi pada saat dibutuhkan;
- e. Pegawai mampu memperbaiki kesalahannya dan mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya kesalahan atau inefesiensi.

Adapun tujuan pelaksanaan manajemen kinerja bagi para pegawai adalah :

- a. Membantu para pegawai untuk mengerti apa yang seharusnya mereka kerjakan dan mengapa hal tersebut harus dikerjakan serta memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan;

- b. Membarikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan baru;
- c. Mengenali rintangan-rintangan peningkatan kinerja dan kebutuhan sumber daya yang memadai;
- d. Pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pekerjaan dan tanggungjawa kerja mereka. (Mangkunegara, 2005:20).

Berdasarkan definisi dan tujuan-tujuan yang dikemukakan oleh Mangkunegara, maka manajemen kinerja adalah suatu proses perencanaan dan pengendalian kerja para aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam tujuan Mangkunegara berbicara tentang bagaimana adanya pehaman antara pimpinan dan bawahan dalam menyelesaikan, mengambil keputusan dan mendapatkan pemahaman yang baik tentang pekerjaan dan tanggung jawab.

6. Pengertian Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja disebut juga "*Performance evaluation*" atau "*Performance appraisal*". *Appraisal* berasal dari kata Latin "*appratiare*" yang berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai oarang lain. Mengginson dalam Mangkunegara (2005:10) mengemukakan evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah "penilaian prestasi kerja (*Performance appraisal*), suatu proses yang digunakan pimpinan untuk

menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.”

Berdasarkan pendapat di atas, maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur kedepannya. Evaluasi harus sering dilakukan agar masalah yang di hadapi dapat diketahui dan dicari jalan keluar yang baik.

Evaluasi kinerja yang dikemukakan Simanjuntak adalah “suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.” (Simanjuntak, 2005:103). Berdasarkan pengertian tersebut maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses yang digunakan oleh pimpinan untuk menentukan prestasi kerja seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya menurut tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Selain itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. Evaluasi kinerja kemudian di definisikan oleh *Society for Human Resource Management* yaitu “*The process of evaluating how well employees perform their jobs when compared to a set of standards, and then*

communicating that information to employees. (Proses mengevaluasi sejauh mana kinerja aparatur dalam bekerja ketika dibandingkan dengan serangkaian standar, dan mengkomunikasikan informasi tersebut pada aparatur).” (Wirawan 2009:12)

Berdasarkan definisi di atas, maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparatur bila dibandingkan dengan serangkaian standarisasi yang dilakukan untuk bekerja sesuai komunikasi informasi yang telah diberikan oleh pimpinan. Evaluasi kinerja dilakukan juga untuk menilai seberapa baik aparatur bekerja setelah menerima informasi dan berkomunikasi dengan aparatur yang lain agar pekerjaan sesuai dengan kemauan pimpinan dan kinerja para aparatur itu sendiri dapat terlihat secara baik oleh pimpinan dan masyarakat selaku penilai.

7. Fungsi Evaluasi Kinerja

Fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan Wirawan (2009) sebagai berikut :

1. Memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Ketika merekrut pegawai (ternilai), aparatur harus melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas, prosedur operasi, dan memenuhi standar kinerja.
2. Alat promosi dan demosi. Hampir disemua sistem evaluasi kinerja, hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi kepada aparatur ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pemberian promosi. Promosi dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus atau komisi, kenaikan pangkat atau menduduki jabatan tertentu. Sebaliknya, jika kinerja aparatur ternilai tidak memenuhi standar atau buruk, instansi menggunakan hasilnya

sebagai dasar untuk memberikan demosi berupa penurunan gaji, pangkat atau jabatan aparatur ternilai.

3. Alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar, sangat baik, atau superior, evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi kinerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk memotivasi aparatur agar mempertahankan kinerja yang superior dan meningkatkan kinerja baik atau sedang.
4. Penentuan dan pengukuaran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang menggunakan prinsip *manajemen by objectives*, evaluasi kinerja dimulai dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal tahun.
5. Konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja, tidak semua aparatur mampu memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Hal itu mungkin karena ia menghadapi masalah pribadi atau ia tidak berupaya menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal. Bagi aparatur seperti ini penilai akan memberikan konseling mengenai penyebab rendahnya kinerja ternilai dan mengupayakan peningkatan kinerja ditahun mendatang. Konseling dapat dilakukan sebelum evaluasi kinerja jika atasan dapat mengetahui kelambanan aparatur.
6. Pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang karier. Evaluasi kinerja menentukan apakah kinerja aparatur dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan kariernya (Wirawan, 2009:24).

Berdasarkan fungsi di atas, evaluasi kinerja merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintahan atau organisasi tertentu untuk menilai kinerja

para aparatur yang lamban. Evaluasi kinerja untuk memotivasi para aparatur untuk meningkatkan kinerjanya, pemberian konseling membantu para aparatur untuk mencegah kinerja yang terlalu lamban sehingga sebelum di adakan evaluasi kinerja para pemimpin sudah lebih dulu menjalankan konseling untuk mengadakan perbaikan pada waktu mendatang. Evaluasi kinerja merupakan alat motivasi bagi para aparatur untuk menaikan standar kerja mereka, selain sebagai alat untuk memotivasi, evaluasi kinerja juga untuk mengukur tujuan kerja serta memberdayakan para aparatur.

8. Sasaran Evaluasi Kinerja

Sasaran-sasaran evaluasi kinerja Aparatur yang dikemukakan Agus Sunyoto (1999) dalam bukunya Kualitas Kinerja Aparatur (edisi kelima) sebagai berikut :

1. Membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja aparatur maupun kinerja organisasi.
2. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para aparatur melalui audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Atas dasar evaluasi kebutuhan pelatihan itu dapat menyelenggarakan program pelatihan dengan tepat.
3. Menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode yang selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan, mutu dan baku yang harus dicapai, sarana dan prasaranan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan.
4. Menemukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi, dan kalau mendasarkan hasil diskusi antara karyawan dan pimpinannya itu untuk

menyusun suatu proposal mengenai sistem bijak (*merit system*) dan sistem promosi lainnya, seperti imbalan(Sunyoto, 1999:1).

Berdasarkan sasaran di atas, evaluasi kinerja merupakan sarana untuk memperbaiki mereka yang tidak melakukan tugasnya dengan baik di dalam organisasi. Banyak organisasi berusaha mencapai sasaran suatu kedudukan yang terbaik dan terpercaya dalam bidangnya. Kinerja sangat tergantung dari para pelaksananya, yaitu para karyawannya agar mereka mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam *corporate planningnya*. Perhatian hendaknya ditujukan kepada kinerja, suatu konsepsi atau wawasan bagaimana kita bekerja agar mencapai yang terbaik. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat memimpin orang-orang dalam melaksanakan kegiatan dan membina mereka sama pentingnya dan sama berharganya dengan kegiatan organisasi. Jadi, fokusnya adalah kepada kegiatan bagaimana usaha untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Untuk mencapai itu perlu diubah cara bekerja sama dan bagaimana melihat atau meninjau kinerja itu sendiri. Dengan demikian pimpinan dan karyawan yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan evaluasi kinerja harus pula dievaluasi secara periodik.

9. Tujuan Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengavaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi, adapun tujuan dari evaluasi kinerja menurut (Ivancevich, 1992) antara lain :

1. Pengembangan

Dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu dtraining dan membantu evaluasi hasil *training*. Dan juga dapat membantu pelaksanaan

Conseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai.

2. Pemberian *Reward*

Dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif dan promosi.

Berbagai organisasi juga menggunakan untuk membarhentikan pegawai.

3. Motivasi

Dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggungjawab sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Perencanaan SDM

Dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan SDM.

5. Kompensasi

Dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil.

6. Komunikasi

Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai. (Darma 2009 :14) Berdasarkan pendapat di atas, sistem evaluasi kinerja sebagaimana yang dikembangkan di atas sangat membantu sebuah manajemen kerja baik instansi pemerintah maupun swasta untuk memperbaiki kinerja pegawai yang kuarang maksimal, tujuan evaluasi kinerja ini untuk membangun semangat kerja para pegawai dan mempertahankan kinerja yang baik dan memperbaiki komuniiasi kerja.

10. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Mahsun (2006:33) menyatakan bahwa sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Pengukuran kinerja sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Manfaat pengukuran kinerja menurut Mahsun (2006:33-34) baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik, antara lain:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

11. Indikator Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (Mahsun, 2006:71). Sementara menurut Lohman dalam Mahsun (2006) indikator kinerja adalah suatu variable yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektifitas dan efisiensi proses dengan pedoman pada target-target dan tujuan organisasi (dalam Mahsun,2006:71).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, indikator kinerja adalah kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas, tanpa indikator yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda, dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda.

Indikator kinerja dipertegas oleh LAN-RI dalam Pasolong (2013:177) adalah ukuran kualitatif atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, dan kebijakan atau peraturan

perundang-undangan. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

BPKP dalam Mahsun (2006:71) menerangkan hal yang tidak jauh berbeda dengan LAN-RI yang menyatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dwiyanto dalam Pasolong (2013:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
2. Kualitas Layanan, banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. **Responsibilitas**, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. **Akuntabilitas**, yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Menurut Hersey, Blanchard dan Johnson dalam Wibowo (2011:102) terdapat tujuh indikator kinerja:

1. Tujuan

Tujuan menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Standar

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

3. Umpan Balik

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

4. Alat atau sarana

Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.

5. Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

6. Motif

Motif merupakan alasan atau pendorog bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan.

7. Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia.

Mahsun (2006:31) memaparkan bahwa organisasi publik memiliki sifat dan karakteristik yang unik. Sehingga organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya mengukur tingkat finansial dan tingkat efisiensi. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.
4. Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Dalam organisasi publik, sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Bila dikaji dari tujuan dan misi utama dari suatu organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik. Ukuran kinerja organisasi publik terlihat sederhana, namun tidaklah demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja organisasi publik.

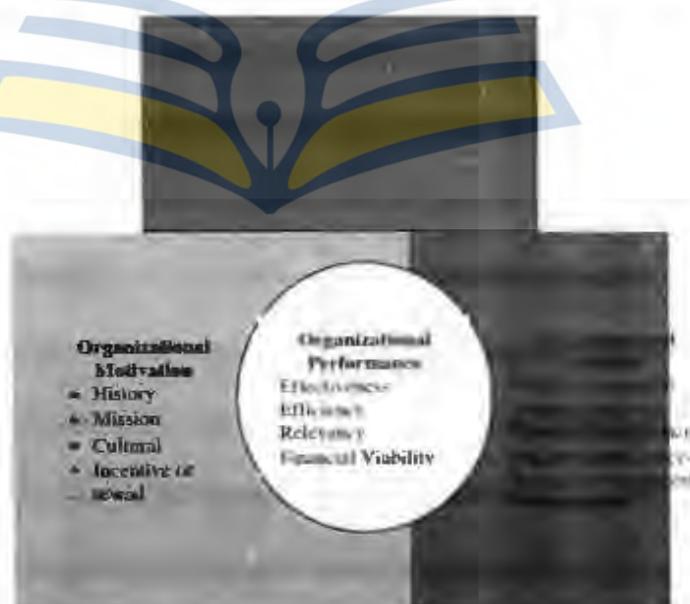
Berkaitan dengan kesulitan yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan oleh Dwiyanto (2008:49) yang menyatakan bahwa kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat multi dimensional. Organisasi public memiliki *stakeholders* yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang

berbenturan satu dengan yang lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata para *stakeholders* juga menjadi berbeda-beda. Berdasarkan pendapat diatas bahwa untuk mengukur kinerja organisasi publik cukuplah sulit karena bersifat multidimensional karena *steakholder* memiliki kepentingan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan mereka masing-masing.

Dari beberapa indikator yang dikemukakan ahli tersebut, peneliti menggunakan indikator kinerja menurut Mahsun dalam menilai kinerja. Indikator ini digunakan oleh peneliti karena indikator ini menilai kinerja dari berbagai aspek mulai dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Dengan begitu akan didapatkan hasil pengukuran kinerja organisasi yang lebih akurat.

12. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi yang baik merupakan tujuan dari setiap organisasi. Menurut Lusthaus (dalam Kurniawati, 2010:97), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Lusthaus (dalam Kurniawati, 2010:97)

Gambar 2.1. Kinerja Organisasi

Faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah :

1. **Lingkungan Eksternal,**

Dimensi kunci yang dapat mempengaruhi lingkungan adalah lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan administratif, aturan, kebijakan, budaya sosial, ekonomi, teknologi. Dapat disingkat menjadi peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasarannya; sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Dalam mengamati lingkungan eksternal, ada beberapa sektor yang peka secara strategi, artinya bisa menciptakan peluang, atau sebaliknya merupakan ancaman. Perkembangan teknologi misalnya, peraturan perundangundangan, atau situasi keuangan, dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi.

2. **Motivasi organisasi,**

Hal yang memotivasi organisasi adalah sejarah, misi, budaya, insentif atau imbalan.

3. **Kapasitas organisasi,**

Terdiri dari Strategi kepemimpinan, Sumber daya manusia, Manajemen keuangan, Proses organisasi, Program manajemen, Infrastruktur, dan Rantai institusional. Kekuatan organisasi terletak pada saat situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategi dalam mencapai sasarannya; sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi

tidak dapat mencapai sarasannya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Berdasarkan pendapat dari diatas maka faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah lingkungan internal dan eksternal serta pemberian penghargaan sehingga dapat memicu peningkatan kinerja. Penilaian kinerja yang disertai penghargaan dapat memotivasi dan memicu peningkatan kinerja.

13. Bentuk evaluasi kinerja dari segi pelaksanaan kegiatan

Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 yang ditinjau dari mekanisme kegiatan dilapangan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran (DPAP) tahun 2015, yang terdiri dari :

1. Penyelenggaraan petugas upacara pembukaan dan penutupan dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 di kota lubuklinggau
2. Pelaksanaan tenaga ahli
3. Penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa
4. Penyelenggaraan penyediaan barang yang akan dijadikan aset tetap oleh pemerintah daerah

Pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan mengevaluasi *kegiatan dan sasaran*, bisa juga mengevaluasi *program dan kebijakan* yang telah ditetapkan. Bisa juga evaluasi dilakukan secara menyeluruh sehingga akhirnya dapat disimpulkan kinerja organisasi. (LAN,2004: 246).

14. Evaluasi kinerja kegiatan dan sasaran.

Menurut wiwaha (2013), Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi

kinerja kegiatan setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Selanjutnya sesuai dengan atribut indikator kinerja dan capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, evaluasi kinerja kegiatan dilakukan. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya.

Program dan kegiatan yang dievaluasi seharusnya merupakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis instansi yang bersangkutan. Bagi instansi pemerintah yang bersangkutan evaluasi yang dilakukan harus merujuk kepada indikator kinerja yang telah ditetapkannya, baik itu input, proses, output, outcome, benefit dan impactnya, dan pula capaiannya, (wiwaha, 2013).

Evaluasi terhadap kegiatan instansi adalah bentuk paling kecil dari evaluasi kinerja organisasi. Seluruh atau sebagian kegiatan dapat dievaluasi menurut prioritas manajemen instansi. Tingkat pentingnya evaluasi sangat ditentukan oleh tingkat pentingnya kegiatan itu sendiri. Jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan pokok atau kegiatan utama yang merupakan ciri organisasi instansi dalam pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan yang cukup dominan dalam rangka menjalankan misi instansi, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan itu adalah penting.

Kedalaman dari evaluasi kegiatan ditentukan oleh manajemen atau pimpinan unit organisasi. Peran penanggung jawab kegiatan dalam menentukan evaluasi terhadap kegiatan sangat penting. Jika penanggung jawab kegiatan

merasa perlu atau sadar akan kewajibannya tentulah evaluasi terhadap kegiatan dilakukan. Jika evaluasi ditujukan untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan tentulah diperlukan evaluasi yang mendalam. Evaluasi kinerja kegiatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: **input-proses-output** dan **input dan output**.

Pendekatan pertama akan dapat memberikan rekomendasi atau feedback tentang berbagai hal baik peningkatan hasil (output) maupun prosesnya. Pendekatan yang kedua masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana caranya meningkatkan kinerja dengan memperbaiki proses pelayanan/ produksi yang dilakukan. Bagi instansi pemerintah kegiatan evaluasi dengan pendekatan yang pertama dilakukan secara lebih sering dan teratur (per triwulan/semester) disesuaikan dengan pola monitoring kinerja secara reguler. Sedangkan pendekatan kedua dilakukan dalam waktu yang agak lama (setahun atau 2 tahun). Oleh karena itu evaluasi yang dilakukan secara reguler sangat mengandalkan sistem pengumpulan data internal yang digunakan dalam memantau (monitoring) kegiatan.

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada evaluasi kinerja kegiatan dengan fokus model **input-proses-output** sehingga dapat diketahui *outcome* dan *impactnya* juga. Karena dengan diketahui kinerja kegiatan maka selanjutnya dapat dievaluasi kinerja program jika dikehendaki.

B. Penelitian Terdahulu

Mengkaji dan mengetahui evaluasi Kinerja maka penulis menggunakan referensi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain agar dapat ditarik

suatu kesimpulan. Penelitian yang relevan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.1.
PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Peneliti	Metode Penelitian	Objek Penelitian
Wendy Fathony Setiawan (2014)	Kualitatif	Evaluasi Kinerja Proyek dengan Pendekatan <i>Weibullized - Earn Value</i>
Sudjarwo (2008)	Kualitatif	Evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV pada Balai Diklat Keagamaan Semarang
Andi Muhammad Fedriansyah (2008)	Kualitatif	Evaluasi kinerja program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Kecamatan Tugu, Semarang
I Nyoman Mursa Winata (2012)	Kualitatif	Evaluasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket C (setara SMA) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Widya Sentana" Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tahun pelajaran 2011/2012
Moh. Dachirin Said (2008)	Kualitatif	Analisis Kinerja Pegawai pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang
Rakhmat Nugroho (2006)	Kuantitatif	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan

(Sumber: Data Sekunder yang diolah)

1. Wendy Fathony Setiawan (2014) dengan judul Evaluasi Kinerja Proyek dengan Pendekatan *Weibullized - Earn Value*. Kesimpulan yang didapat yaitu:
 - a. Perkiraan biaya akhir proyek (*Estimated at Completion*) dari pengerjaan rumah tipe 40/78 blok 25 adalah sebesar sebesar Rp 43.393.298,55, biaya

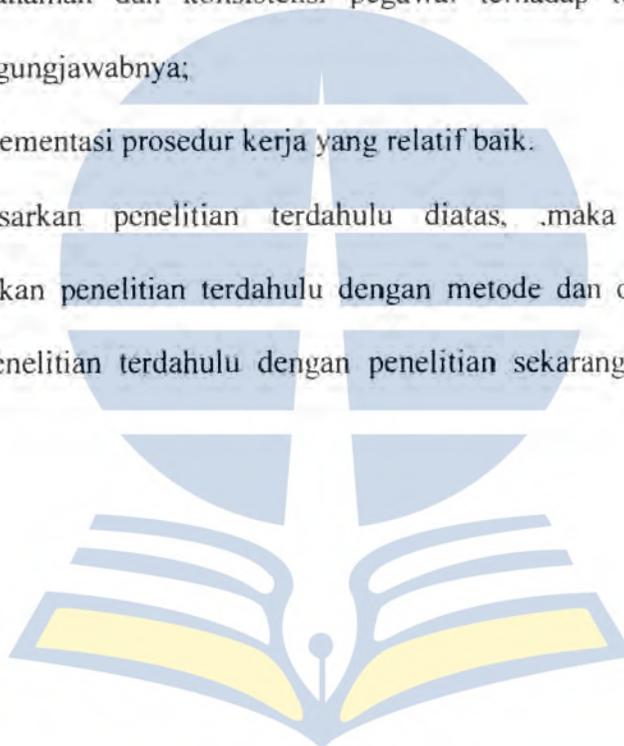
- ini lebih rendah daripada rancangan anggaran biaya atau setengah dari RAB yaitu Rp 92.659.100.
- b. Selanjutnya, perkiraan waktu penyelesaian proyek (*Time Estimated*) adalah 108 hari atau kinerja proyek sedikit mengalami molor daripada yang direncanakan yaitu selama 97 hari.
2. Sudjarwo (2008) dengan judul Evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV pada Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kesimpulan yang diperoleh yaitu:
- a. Status kinerja *inputs* kurang. Status kinerja proses baik. Sedang status kinerja *outputs* sedang. Kurang kinerja *inputs* disebabkan oleh rendahnya komitmen terhadap penyediaan faktor sumber pelayanan. Aspek pelayanan akademik yang masih berkinerja rendah semua berada pada indikator *inputs* tersebar pada unsur-unsur: hardware, dan software khususnya pada aspek kualifikasi peserta, penyediaan kelas, dan seleksi peserta.
 - b. Akhirnya dapat dikemukakan bahwa faktor pendukung layanan akademik baik hardware maupun software masih perlu pembenahan yang memadai. Perubahan pola pikir dan pola kerja sumber daya aparatur tidak selalu berjalan sejajar dengan sikap dan perilaku kerja. Untuk mengoptimalkan peningkatan kompetensi alumni diklat, agaknya pembinaan langsung oleh atasan secara berkelanjutan menjadi sangat penting.
3. Andi Muhammad Fedriansyah (2008) dengan judul Evaluasi kinerja program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Kecamatan Tugu, Semarang. Hasil yang diperoleh yaitu Benefit program PEMP berdasarkan

pengamatan kurang memberi hasil kepada masyarakat. Kelompok-kelompok yang dibentuk hanya merupakan instrumen untuk mendapatkan modal. Kegiatan pendampingan yang seharusnya dilakukan oleh kelembagaan yang telah dibentuk tidak optimal. Sedangkan kebutuhan alat yang merupakan kebutuhan utama masyarakat nelayan belum bisa dipenuhi oleh kedai pesisir.

4. I Nyoman Mursa Winata (2012) dengan judul Evaluasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket C (setara SMA) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Widya Sentana" Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tahun pelajaran 2011/2012. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu hasil analisis dari variabel konteks, input, proses dan produk secara berturut-turut menunjukkan nilai (+ + - +), dan jika dikonversikan kedalam kuadran Glickman, maka kualitas efektifitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket c (setara sma) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Widya Sentana" Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tahun pelajaran 2011/2012, tergolong efektif. Untuk menjamin bahwa program ini lebih efektif, maka substansi yang perlu disempurnakan adalah pada faktor proses.
5. Nugroho (2006.) dengan Judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan. Kesimpulan Penelitian:
 - a. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan dan kinerja karyawan;
 - b. Terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan;

6. Said (2008) dengan Judul Analisis Kinerja Pegawai pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang. Kesimpulan Penelitian:
- a. Kualitas hasil kerja yang terbina dengan baik disebabkan adanya komitmen pegawai terhadap sasaran organisasi (target oriented);
 - b. Rendahnya resistensi pegawai dalam melaksanakan tugas menyebabkan kuantitas hasil kerja yang memadai;
 - c. Adanya tanggungjawab yang tinggi dari pegawai disebabkan adanya pemahaman dan konsistensi pegawai terhadap tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. Implementasi prosedur kerja yang relatif baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti mencoba mengembangkan penelitian terdahulu dengan metode dan objek yang berbeda, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada Tabel 2.2.



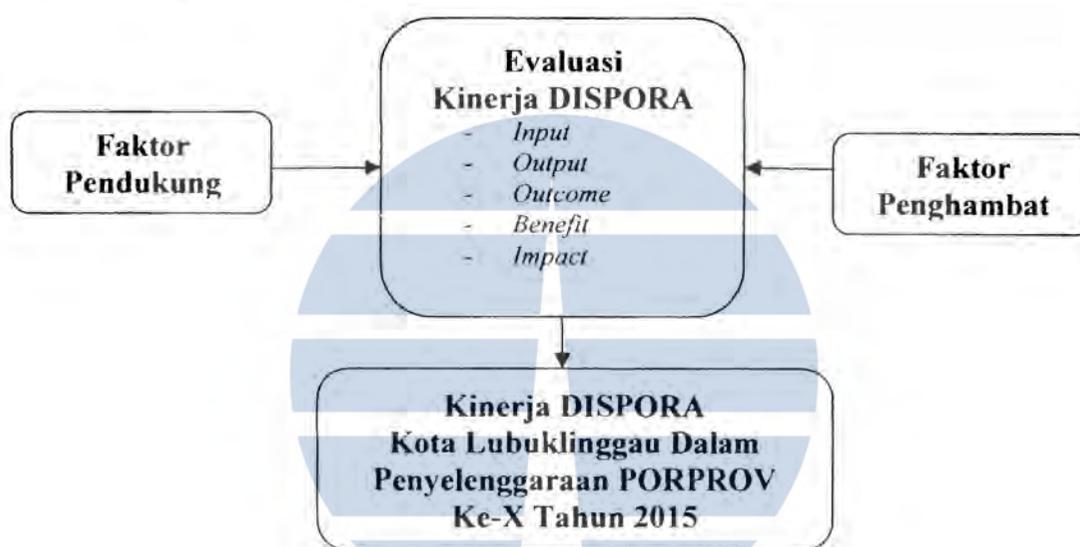
TABEL 2.2.
PERBEDAAN PENELITIAN SEBELUMNYA DENGAN PENELITIAN
SEKARANG

Peneliti	Persamaan	Perbedaan
Wendy Fathony Setiawan (2014)	a. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. b. Tujuan penelitian sama-sama untuk mengevaluasi kinerja dari serangkaian proses yang telah dilaksanakan.	a. Penelitian terdahulu lebih menonjolkan teknik evaluasi yang digunakan
Sudjarwo (2008)	a. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. b. Tujuan penelitian sama-sama untuk mengevaluasi kinerja dari pelaksanaan kegiatan.	Evaluasi dilakukan dengan indicator yang digunakan yaitu inputs, proses, dan outputs. Sedang penelitian sekarang secara <i>inputs, outputs, benefit, income, dan impact</i>
Andi Muhammad Fedriansyah (2008)	a. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. b. Tujuan penelitian sama-sama untuk mengevaluasi kinerja dari pelaksanaan program.	Pembahasan penelitian tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
I Nyoman Mursa Winata (2012)	a. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. b. Tujuan penelitian sama-sama untuk mengevaluasi kinerja dari pelaksanaan program.	
Nugroho (2006)	Metode yang digunakan yaitu Kualitatif	Lebih menimbulkan sisi baik dari suatu karyawan atau instansi dan tidak berusaha untuk menggali kelemahannya.
Said (2008)	Tujuan penelitian untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan	Melihat kinerja pegawai secara keseluruhan

(Sumber: Data Sekunder yang diolah)

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan evaluasi terhadap penyeklenggaraan kegiatan PORPOV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau, evaluasi yang dilakukan bertujuan agar dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau, adapun gambar kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan PORPOV ke-X tahun 2015 adalah dengan menganalisis faktor penghambat dan pendukung pada beberapa indikator kinerja berupa *input*, *process*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Input meliputi perencanaan penganggaran, pengadaan fasilitas, dan lain-lain, *process* merupakan pengawasan dalam pembangunan *venue* dan fasilitas lainnya *output* yaitu jalannya kegiatan, *outcome* adalah hal-hal yang menjadi tujuan jangka pendek penyelenggaraan kegiatan, *benefit* menyangkut manfaat yang diperoleh setelah kegiatan baik bagi

atlet dan daerah penyelenggaraan, serta *impact* menyangkut masalah dampak positif dan negatif setelah penyelenggaraan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau ini.

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil evaluasi dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari Miles dan Huberman dalam (Emzir, 2010) yang menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data dalam penelitian ini adalah dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dari data mentah yang diperoleh di lapangan tentang pelaksanaan PORPROV di kota Lubuklinggau. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan dalam mengevaluasi aspek *input*, *process*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact* dalam pelaksanaan PORPROV di kota Lubuklinggau.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. *Display* data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Fenomena-fenomena yang muncul dari hasil evaluasi dalam pelaksanaan PORPROV ini tentu bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan untuk menyusun pola-pola permasalahan. Bila pola-pola permasalahan pada aspek *input*, *process*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact* yang ditemukan

telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan untuk menjawab rumusan permasalahan ataupun temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan harus mampu mendeskripsikan peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) di Kota Lubuklinggau secara ringkas dan mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kinerja serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau.

D. Operasionalisasi Konsep

Definisi operasional konsep adalah pengertian yang diungkap dalam definisi konsep tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Adapun operasional konsep dalam penelitian ini adalah:

1. *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan pada perencanaan awal dalam segala aspek agar pelaksanaan PORPROV tahun 2015 di kota lubuklinggau dapat berjalan dengan baik.
2. *Process* adalah ukuran kegiatan pada saat kegiatan berlangsung, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan PORPROV tahun 2015 di kota lubuklinggau.

3. *Output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari pelaksanaan PORPROV tahun 2015 di kota lubuklinggau yang dapat berupa fisik atau nonfisik.
4. *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan adanya fungsi dari hasil keluaran setelah pelaksanaan PORPROV tahun 2015 di kota lubuklinggau pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung kepada atlet, daerah, dan lain-lain yang menjadi tujuan penyelenggaraan PORPROV.
5. *Benefit* adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir sesuai visi dan misi dari pelaksanaan PORPROV tahun 2015 di kota lubuklinggau.
6. *Impact* adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif kepada atlet, daerah, dan lain-lain yang menjadi subjek penyelenggaraan setelah pelaksanaan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau.
7. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 di kota lubuklinggau, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam upaya suksesnya kegiatan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau naturalistic karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi.

Obyek alamiah yang dimaksud oleh Sugiono (2013) adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada diobyek dan setelah keluar dari obyek relative tidak berubah. Jadi selama melaksanakan penelitian mengenai evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau, peneliti sama sekali tidak mengatur kondisi tempat penelitian berlangsung maupun melakukan manipulasi terhadap hasil data di lapangan.

Metode kualitatif menurut Creswell (1998) adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat suatu gambaran kompleks meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007) menyebutkan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif adalah terhadap makna. Dalam hal ini penelitian naturalistik tidak peduli terhadap kesamaan dari objek penelitian melainkan sebaliknya mengungkap tentang pandangan kehidupan dari orang yang berbeda. Pemikiran ini didasari pula oleh kenyataan bahwa makna yang ada dalam setiap orang berbeda. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengungkap kenyataan yang ada dalam diri orang yang unik itu menggunakan alat lain kecuali manusia itu sendiri yang menjadi instrument dalam penelitian.

Dengan menggunakan metode kualitatif, realitas atau fenomena mengenai kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau akan dipandang sebagai suatu hasil konstruksi pemikiran yang dinamis dan penuh makna. Hal tersebut sejalan dengan teori Sugiono (2013) yang menyebutkan bahwa realitas dalam metode penelitian kualitatif merupakan konstruksi dari pemahaman terhadap semua data dan maknanya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai kebermaknaan hidup yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya pada situasi tertentu.

Fenomenologi tidak memungkinkan bahwa seseorang peneliti tidak dilepaskan dari prasangka atau asumsinya. Namun disisi fenomenologi memiliki ciri khas yaitu fenomena yang hendak diselidiki haruslah berupa gejala yang murni. Dalam Kuswarno (2009) disebutkan bahwa fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung dan berkaitan dengan sifat alami pengalaman manusia itu sendiri, serta makna

yang diletakan padanya. Objek kajian dari fenomenologi adalah sebuah kesadaran dari pengalaman yaitu keadaan yang memberikan sudut pandang pengalaman dari orang pertama.

Jadi peneliti berusaha untuk menggali informasi mengenai fakta yang terjadi selama pelaksanaan PORPROV yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Kota Lubuklinggau dan untuk mengetahui serta memperoleh informasi mengenai peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) tahun 2015 di Kota Lubuklinggau dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau.

B. Sumber Informasi dan pemilihan Informan

Subyek penelitian ini adalah sumber utama penelitian yang memiliki data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* Dalam (Sugiono,2009:300) dikemukakan bahwa, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau
2. Kepala Bidang Keolahragaan

3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
4. Kepala Seksi Prestasi Olahraga
5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
6. Kasubag Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

C. Instrumen Wawancara

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menjadi *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Peneliti sebagai instrument perlu “divalidasi” seberapa jauh kesiapannya dalam melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan (Sugiono 2013).

Proses validasi ini dilakukan melalui evaluasi dari sejauh mana pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori, dan wawasan terhadap bidang yang akan diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Moleong (2007) juga menegaskan peran peneliti dalam metode penelitian kualitatif yang merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian, jadi dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung kelapangan dari pengumpulan data, analisis data, hingga membuat kesimpulan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini pengumpulan data, prosedur yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Study kepustakaan (*literature*) yaitu teknik pengumpulan data dan informasi melalui sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan metode :
 - a. Dokumentasi yaitu penulis melakukan atau mempelajari aturan-aturan ataupun melakukan studi di kantor dinas pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau untuk melihat atau mengetahui kinerja pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
 - b. Wawancara dimana peneliti bertemu langsung dengan sumber data atau informan untuk bertukar informasi melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan dengan topik pembicaraan dan penelitian.
 - c. Triangulasi Data dimana peneliti mencari data pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model deskriptif naratif menurut *Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2012:246)* Proses analisis dalam penelitian kualitatif ini dilakukan bersifat siklus yang dilakukan sewaktu peneliti berada dilapangan maupun setelah peneliti meninggalkan lapangan penelitian. Untuk menyajikan data agar lebih bermakna dan mudah dipahami, ada tiga alur kegiatan proses analisis data yang dilakukan peneliti secara bersamaan yaitu :

1. Reduksi data

Dalam reduksi data peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting hal ini untuk melihat

tema dan pola dari data yang diperoleh selama wawancara. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang cukup jelas. Seperti dikatakan *Moleong (2001)*, analisis data penelitian ditempuh dengan penelaahan data, reduksi data, unitisasi data yaitu langkah penyusunan data kedalam satuan satuan atau unit masalah, kategorisasi, dan pemeriksaan keabsahan data, dan penafsiran data dalam mengolah hasil. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data penelitian dengan membuang atau mengesampingkan hasil wawancara yang kurang diperlukan.

2. Penyajian data,

Untuk penyajian data peneliti melakukan dengan menyusun data secara sistematis sesuai dengan judul penelitian. Dalam membuat kesimpulan peneliti tidak membuat kesimpulan final sebelum pengumpulan data berakhir. Peneliti melakukan verifikasi kesimpulan kesimpulan yang diperoleh selama penelitian berlangsung, sehingga data yang diperoleh benar benar dapat dipertanggung jawabkan

3. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Setelah dilakukan analisis mendalam maka langka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan. Kesimpulan awal kemungkinan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal , didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau adalah salah satu SKPD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam membantu Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Walikota. Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 191 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemuda dan Olahraga yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pemuda dan olahraga serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Lubuklinggau memiliki VISI dan MISI sebagai berikut :

2. VISI :

“Menjadi lembaga yang profesional dalam mewujudkan OLAHRAGA dan PEMUDA Lubuklinggau yang berprestasi, berdaya saing dan berbudaya dalam rangka pembentukan karakter bangsa”

Selanjutnya perwujudan seperti yang diungkapkan di atas memiliki tujuan jangka panjang yaitu terselenggaranya pelayanan kepemudaan yang mendukung meningkatnya produktifitas pemuda yang berorientasi mandiri, meningkatnya budaya dan prestasi olahraga dikalangan pemuda.

Secara garis besar arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau untuk masa lima tahun ke depan menitik beratkan pada :

- a) Meningkatnya kinerja SDM dan kinerja organisasi
- b) Meningkatnya peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan
- c) Meningkatnya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
- d) Meningkatnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- e) Meningkatnya pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
- f) Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- g) Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga

3. MISI :

1. Meningkatkan kepastian dan kapabilitas kelembagaan dinas pemuda dan olahraga
2. Meningkatkan pemuda yang produktif berorientasi mandiri
3. Meningkatkan olahragawan berprestasi dan sarana dan prasarana olahraga.

B. Hasil Penelitian

Pelaksanaan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau yang diselenggarakan pada tanggal 24 mei 2015 s/d 30 mei 2015 dimana sebanyak 24 cabang olahraga dipertandingkan pada event tersebut.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan PORPROV tahun 2015 yang diselenggarakan di Kota Lubuklinggau, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau berperan sebagai koordinator dengan pihak – pihak lain yang menjadi panitia penyelenggara kegiatan tersebut.

Dari hasil penelitian dilapangan peneliti menemukan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau masih belum optimal dikarenakan anggaran penunjang dalam kegiatan tersebut kurang, hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau,

‘anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah cukup namun pada kenyataan dilapangan ada item–item yang memang bersifat fluktuatif seperti sewa penginapan yang mengalami perubahan harga dan penambahan jumlah unit yang tidak terduga sehingga ini menyulitkan bagi kami selaku koordinator dan pengawas untuk memberikan sarana yang cukup untuk para atlit dan official’ (wawancara pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 10.15 WIB).

Hal senada juga terungkap dengan Kepala Bidang Olahraga DISPORA Kota Lubuklinggau mengenai biaya sewa gedung yang kurang untuk menyelenggarakan cabang olahraga bilyar dan karate,

‘kegiatan PORPROV tahun 2015 di lubuklinggau secara umum sukses terselenggara namun sukses terlaksananya kegiatan tersebut juga masih menghadapi masalah – masalah salah satu contoh pada saat penyelenggaraan cabang olahraga bilyar dan karate dimana sewa gedungnya ternyata belum termasuk sewa pendingin udaranya, sehingga kita harus mengeluarkan dana lagi untuk itu dan hal ini diluar sepengetahuan kami’ (wawancara pada 25 Februari 2016 pukul 12.45WIB).

Dari hasil pengamatan pada saat event berlangsung, peneliti juga melihat kekurangan anggaran ini bukanlah satu – satunya masalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan event tersebut, koordinasi antara pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dan pihak KONI SumSel serta pihak

sponsor juga belum terlalu solid hal ini dibuktikan dengan pada saat perencanaan penyelenggaraan dengan pihak – pihak terkait kurang mengantisipasi secara menyeluruh terhadap apa saja hal – hal yang kemungkinan timbul dan perubahan – perubahan apa saja yang kemungkinan terjadi. Salah satu contohnya adalah penyusunan pos anggaran yang kurang antisipatif seperti biaya sewa penginapan bagi atlit dan tim pendukung yang ternyata kurang, sehingga menyebabkan panitia harus mencari rumah – rumah penduduk untuk disewa. Hal ini juga dirasa kurang nyaman bagi para atlit sehingga konsentrasi mereka terganggu, keterangan ini didapat peneliti pada saat peneliti meninjau kegiatan PORPROV yang sedang berlangsung, kemudian ada beberapa tim atlit dari kabupaten Banyuasin yang mengungkapkan hal tersebut kepada peneliti.

Beberapa kekurangan yang terjadi terkait dengan kesiapan penyelenggaraan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau seperti kesiapan anggaran, venue dan tempat penginapan para kontingen yang akan berlaga di PORPROV Lubuklinggau 2015. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau, berikut kutipan wawancaranya,

‘anggaran yang direncanakan untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut cukup namun pada kenyataan dilapangan ada item – item yang memang bersifat fluktuatif seperti sewa penginapan yang mengalami perubahan harga dan penambahan jumlah unit yang tidak terduga sehingga ini menyulitkan bagi kami selaku koordinator dan pengawas untuk memberikan sarana yang cukup untuk para atlit dan official’ (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau. wawancara tanggal 24 februari 2016 pukul 10.15wib).

Hal yang sama dituturkan oleh KaBid Olahraga DISPORA Lubuklinggau,

‘kegiatan PORPROV di Lubuklinggau secara umum sukses terselenggara namun sukses terlaksananya kegiatan tersebut juga masih menghadapi masalah – masalah salah satu contoh pada saat penyelenggaraan cabang olahraga bilyar dan

karate dimana sewa gedungnya ternyata belum termasuk sewa pendingin udaranya, sehingga kita harus mengeluarkan dana lagi untuk itu dan hal ini diluar sepengetahuan kami' (Kepala Bidang Olahraga. wawancara 25 februari 2016 pukul 12.45wib).

Juga dikatakan oleh Kepala Bidang Olahraga, tentang penyelenggaraan PORPROV Tahun 2015 ini yaitu,

'salah satu masalah yang dihadapi pada penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau adalah terjadi pada saat penyelenggaraan cabang olahraga bilyar dan karate karena penyewaan gedung untuk pelaksanaan kedua cabang olahraga tersebut belum termasuk biaya sewa pendingin udaranya (AC) sehingga panitia penyelenggara harus mengeluarkan dana tambahan sebesar Rp. 7.500.000,- sebagai uang sewa pendingin udara (AC) yang belum masuk kedalam pos anggaran belanja'.

C. Pembahasan

Pada bagian ini peneliti penulis akan memaparkan hasil analisis dan interpretasi data dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini sebelumnya, yaitu untuk mengetahui Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dan faktor apakah yang menjadi penghambat dari ke enam indikator dalam penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau. Menurut Mahsun (2006:31) Keenam indikator tersebut terdiri dari:

1. Kelompok masukan (*input*) dalam penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau.
2. Kelompok proses (*process*) penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau.
3. Kelompok keluaran (*output*) dari penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau.

4. Kelompok hasil (*outcome*) yang dicapai dari penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau.
5. Kelompok manfaat (*benefit*) yang didapat dari penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau.
6. Kelompok dampak (*impact*) yang dihasilkan dari penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau.

Bila dikaitkan antara Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau indikator kinerja menurut Mahsun yang diadopsi penulis sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka terdapat enam indikator yang menggambarkan bagaimana Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan Kegiatan. Adapun hasil pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Kinerja organisasi pada aspek *input*

input dalam penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk mensukseskan penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau seperti ketersediaan anggaran dana, sarana dan prasarana seperti venue dan penginapan, landasan hukum dan para panitia penyelenggara. Dalam pelaksanaan PORPROV di Kota Lubuklinggau ini ketersediaan dana tergolong masih belum cukup dikarenakan proses penyusunan anggaran yang dapat dikatakan belum matang sehingga

mengakibatkan banyak kendala dalam pelaksanaan PORPROV di Kota Lubuklinggau.

Salah satu hal yang mengakibatkan kekurangan dana dalam PORPROV di Kota Lubuklinggau tahun 2015 adalah penyelenggaraan cabang olahraga bilyar dan karate yang venue-nya dilakukan dengan menyewa gedung Bagasraya Yadika, dalam perjanjian sewa yang dilakukan oleh pihak penyelenggara PORPROV Kota Lubuk Linggau 2015 dalam hal ini adalah DISPORA tidak efektif karena dalam proses sewa gedung belum dimasukkan anggaran untuk sewa AC sehingga hal tersebut berpengaruh pada pos anggaran.

Dalam proses penganggaran dana penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau, penyelenggara juga belum memasukkan mata anggaran untuk asuransi para atlet yang akan bertanding pada PORPROV di Kota Lubuklinggau pada anggaran tahun berjalan sehingga harus dibebankan pada anggaran tahun berikutnya.

Pembesaran anggaran juga terjadi pada pelaksanaan pengerjaan venue-venue yang mengalami penambahan-penambahan dalam proses pengerjaannya sehingga melebihi kemampuan dana yang telah dianggarkan pada tahun tersebut. Maka untuk menutupi kekurangan-kekurangan anggaran pada proses pengerjaan venue-venue tersebut akan dibebankan pada anggaran tahun berikutnya.

Selain anggaran dana, kekurangan yang lain juga tampak pada ketersediaan penginapan untuk para atlet dan official yang akan berlaga di Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau yang berasal dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan yang belum bisa terpenuhi sehingga harus menyewa pemukiman-pemukiman

penduduk untuk tempat menginap para kontingen peserta Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV).

2. Kinerja organisasi pada aspek proses

Secara keseluruhan penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau sudah baik dan terselenggara dengan sukses, namun masih ada beberapa kekurangan yang terjadi terkait dengan kesiapan penyelenggaraan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau seperti kesiapan anggaran, venue dan tempat penginapan para kontingen yang akan berlaga di PORPROV Lubuklinggau 2015. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau pada wawancara tanggal 24 februari 2016 pukul 10.15wib diperoleh informasi bahwa, anggaran yang direncanakan untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut cukup namun pada kenyataan dilapangan ada item – item yang memang bersifat fluktuatif, seperti sewa penginapan yang mengalami perubahan harga dan penambahan jumlah unit yang tidak terduga sehingga ini menyulitkan bagi kami selaku koordinator dan pengawas untuk memberikan sarana yang cukup untuk para atlit dan official. Menurutnya tempat penginapan banyak yang mengalami perubahan harga dan juga jumlah unit sehingga harus mengeluarkan anggaran lebih dan juga menyulitkan pihak pelaksana.

Hal yang sama dituturkan oleh Kepala Bidang Olahraga DISPORA Kota Lubuklinggau pada wawancara pada 25 februari 2016 pukul 12.45wib diperoleh informasi bahwa kegiatan PORPROV tahun 2015 di kota lubuklinggau secara umum sukses terselenggara, namun sukses terlaksananya kegiatan tersebut juga masih menghadapi masalah – masalah salah satu contoh pada saat

penyelenggaraan cabang olahraga bilyar dan karate dimana sewa gedungnya ternyata belum termasuk sewa pendingin udaranya, sehingga kita harus mengeluarkan dana lagi untuk itu dan hal ini diluar sepengetahuan kami.

Menurut Kepala Bidang Olahraga DISPORA Kota Lubuklinggau, salah satu masalah yang dihadapi pada penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau, adalah terjadi pada saat penyelenggaraan cabang olahraga bilyar dan karate karena penyewaan gedung untuk pelaksanaan kedua cabang olahraga tersebut belum termasuk biaya sewa pendingin udaranya (AC). Sehingga panitia penyelenggara harus mengeluarkan dana tambahan sebesar Rp. 7.500.000,- sebagai uang sewa pendingin udara (AC) yang belum masuk kedalam pos anggaran belanja.

Selain itu terdapat dua buah lapangan yang belum rampung yaitu lapangan futsal dan lapangan tembak yang terhambat penyelesaiannya sehingga hal ini berdampak kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan, sarana yang dibuat belum 100% selesai sehingga terasa kurang nyaman peserta dalam mengikuti pertandingan. Pada saat pelaksanaan PORPROV Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau memang masih ada beberapa kekurangan yang terjadi seperti adanya dua buah lapangan yang belum selesai 100% proses pengerjaannya yakni lapangan tembak dan juga lapangan futsal sehingga dirasa kurang optimal dalam pelaksanaannya, namun untuk venue-venue yang lainnya sudah siap semua.

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat koordinasi yang kurang baik antar pihak penyelenggara dan juga rencana kegiatan yang kurang matang khususnya pada masalah penganggaran sehingga mengakibatkan ketidakmampuan anggaran tahun tersebut untuk memenuhi

kebutuhan dana pada kegiatan PORPROV Kota Lubuklinggau tahun 2015 sehingga harus dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah berlangsung dapat diuraikan kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 dalam aspek proses, yaitu :

a. Penyelenggaraan petugas upacara pembukaan dan penutupan dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau

Penyelenggaraan kegiatan ini bertugas dan bertanggung jawab serta berperan penuh terhadap :

- a) Membawa bendera cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan dan membawa bendera-bendera para kontingen daerah yang turut serta dalam pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) tahun 2015 di Kota Lubuklinggau
- b) Menjadi komando atau panduan tanda setiap kontingen agar tetap dalam barisan sesuai dengan daerah kabupaten / kotanya masing-masing.

Pada kegiatan ini dapat dikatakan sangat sukses, petugas upacara pembukaan dan penutupan dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau sudah melaksanakan tugas dengan baik, teroganisir dan sesuai yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari latihan rutin yang diadakan tim petugas sebelum pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksanaan tenaga ahli

Dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV ini sangat diperlukan tenaga ahli perencana dan pengawas khususnya di bidang sarana dan prasarana, dikarenakan sumber daya tenaga teknis yang ada pada dinas pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau belum maksimal dan sesuai dengan instruksi Walikota

Lubuklinggau bahwasannya dalam hal pembangunan di bidang sarana dan prasarana harus berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah teknis, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Lubuklinggau. Tugas serta peran dari perencana dan pengawas, yaitu :

a) Perencana

- (1) Merencanakan dan menggambar atau mendesain prasarana pembangunan fisik yang berpedoman dengan standarisasi venue nasional, seperti misalnya pembangunan lapangan bola voli pasir, atletik dan lain sebagainya
- (2) Menghitung atau membuat rencana anggaran biaya untuk pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan PORPROV

b) Pengawas

- (1) Mengawasi semua pembangunan sarana dan prasarana guna dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV
- (2) Melaporkan progres kemajuan fisik pembangunan sarana dan prasarana kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan penyelenggaraan PORPOV.

Namun dalam hal perencanaan dan pengawasan ini belum optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan ada beberapa *venue* yang direncanakan dan diharapkan selesai dalam waktu yang tepat sebelum penyelenggaraan namun realitanya belum terselesaikan seperti lapangan futsal dan lapangan tennis yang terhambat penyelesaiannya, belum tersedianya gedung cabang Olahraga Bilyard dan Karate dan Penginapan para Atlet dan Official yang belum terpenuhi. hal ini menunjukkan bahwa tim perencana dan tim pengawas tidak berkoordinasi dengan

baik sehingga berdampak kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan, sarana yang dibuat belum 100% selesai sehingga terasa kurang nyaman peserta dalam mengikuti pertandingan. Tim pengawas seharusnya cekatan dalam permasalahan ini, menganalisis segala kebutuhan yang diperlukan agar *venue* tidak terhambat pembangunannya entah itu penambahan personil atau yang lainnya. Penginapan para Atlet dan *Official* dari 17 Kabupaten/Kota yang belum bisa terpenuhi sehingga harus menyewa rumah penduduk untuk tempat menginap para kontingen tersebut

c. Penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa

Tidak ada kendala yang berarti dalam hal penyediaan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari pada saat penyelenggaraan PORPROV di Kota Lubuklinggau. Untuk penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa dalam kegiatan PORPROV ini, tugas-tugas yang diberikan terdiri dari :

a) Penyelenggaraan penyediaan alat tulis kantor

Penyelenggaraan penyediaan alat tulis kantor ini bertanggung jawab dalam hal persiapan dan pengadaan seluruh jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan sebelum penyelenggaraan kegiatan, dalam masa penyelenggaraan kegiatan sampai dengan selesainya penyelenggaraan kegiatan PORPROV, tetapi dalam penyelenggaraan kegiatan belanja alat tulis kantor ini hanyalah diperuntukkan bagi panitia penyelenggaraan kegiatan PORPROV saja

b) Penyelenggaraan penyediaan alat listrik penerangan lampu pada tempat-tempat pertandingan

Dalam penyelenggaraan ini hasil yang didapatkan adalah semua persiapan peralatan kelistrikan dan penerangan sudah dipersiapkan sebelum dimulainya

penyelenggaraan PORPROV guna kelengkapan dan penunjang setiap cabang olahraga-cabang olahraga, terkhusus yang pelaksanaannya di dalam ruangan (indoor) sehingga dalam hal ini dapat dikatakan lancar dan sesuai harapan.

c) Penyelenggaraan penyediaan bahan bakar minyak (BBM)

Dalam menunjang terselenggaranya kegiatan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau tanpa hambatan untuk menggunakan transportasi, maka penyelenggaraan penyediaan bahan bakar minyak sangat diperlukan dan dalam penyelenggaraannya sudah sesuai harapan, bahan bakar minyak yang dimaksud diperuntukkan untuk :

- (1) Bahan bakar minyak kendaraan roda 6 (mobil bis) yang dipergunakan sebagai sarana transportasi antar jemput untuk semua kontingen yang mengikuti pertandingan secara kelompok dan jarak tempuh antara pemondokan atlet dengan venue pertandingan cukup jauh
- (2) Bahan bakar minyak kendaraan roda 4 yang hanya disediakan khusus untuk para panitia penyelenggaraan kegiatan PORPROV.
- (3) Bahan bakar minyak juga diperuntukkan sebagai bahan bakar minyak mesin listrik (genset) dengan harapan bilamana terjadi pemadaman listrik pada venue-venue pertandingan telah dipersiapkan mesin genset tersebut dalam kondisi siap pakai.

d) Penyelenggaraan jasa media massa atau publikasi

Peliputan media massa terhadap persiapan atau pelaksanaan suatu event akan sangat signifikan. Untuk mendapatkan publisitas cara ini lebih kredibel karena liputan dilakukan langsung oleh pihak media, tanpa ada distorsi dan upaya manipulasi. Oleh karena itulah penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015

ini dinas pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau menggunakan jasa media massa dan publikasi, baik dari persiapan penyelenggaraan hingga penutupan. Jasa media massa / publikasi hanya menggunakan media massa lokal dan regional wilayah Kota Lubuklinggau dikarenakan kegiatan PORPROV ini yang hanya dilaksanakan untuk tingkat kabupaten / kota dalam provinsi Sumatera Selatan,

e) Penyelenggaraan jasa *event organizer* (EO)

Dalam pengertian sederhana yang disebut sebagai *event organizer* adalah pengelola suatu kegiatan (pengorganisir acara). *Event organizer* juga adalah istilah untuk penyedia jasa profesional penyelenggara kegiatan atau acara. Pada dasarnya tugas *event organizer* adalah membantu kliennya (*client*) untuk dapat menyelenggarakan acara yang diinginkan. Memaknai pengertian uraian diatas, maka dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau menggunakan jasa *event organizer* tersebut sudah sangat baik, penggunaan jasa *event organizer* dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV ini dibagi menjadi 3 (tiga) tugas :

- (1) Jasa *event organizer* untuk acara pembukaan (*opening*) dan penutupan (*closing*) penyelenggaraan kegiatan PORPROV

Tugas-tugas dari jasa *event organizer* ini terdiri dari :

- (a) Mensetting acara tempat pembukaan (*opening*) dan penutupan (*closing*) penyelenggaraan kegiatan PORPROV ini hingga sedemikian rupa, baik dari tata letak panggung, dekorasi, susunan/rangkaian acara, pesta kembang api, dan lain sebagainya

- (b) Menyiapkan hiburan musik dengan mendatangkan artis dari ibukota jakarta sekaligus juga sebagai penghibur masyarakat Kota Lubuklinggau

(2) Jasa *event organizer marching band* nasional

Dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV ini, untuk mengisi rangkaian acara pembukaan (*opening*) dispora Kota Lubuklinggau mendatangkan *marching band* nasional “GITA BAHANA” dari SMA Taruna Nusantara Magelang, Adapun tugas dari jasa *event organizer* yang telah berhasil dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV, yaitu :

- (a) Mendatangkan para personil yang tergabung dalam *marching band* tersebut ke Kota Lubuklinggau untuk mengisi salah satu rangkaian acara pembukaan (*opening*) penyelenggaraan kegiatan PORPROV,
- (b) Semua jasa transportasi, akomodasi dan konsumsi bagi semua personil yang tergabung dalam *marching band* tersebut
- (3) Jasa *event organizer* pembuatan senam linggau BISA

Semenjak dari mulai pencalonan sebagai walikota dan wakil walikota dan terpilih menjadi walikota dan wakil walikota Kota Lubuklinggau periode 2013-2018, pasangan walikota dan wakil walikota mempunyai motto ***Brain, Inovatif, Speed, Acountability (BISA)***, maka dari itu dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 diharapkan menciptakan suatu senam yang khusus bagi pemerintah Kota Lubuklinggau dan umumnya masyarakat Kota Lubuklinggau serta sebagai salah satu pengisi acara pembukaan (*opening*) dan penutupan (*closing*) pada penyelenggaraan kegiatan PORPROV. Tugas dan peran jasa *event organizer* telah berhasil dilaksanakan dalam hal ini adalah ini :

- (a) Mendatangkan instruktur ahli dalam penciptaan dan pembuatan senam “Linggau BISA”
- (b) Menciptakan senam khusus bagi pemerintah kota Lubuklinggau dan umumnya bagi masyarakat Kota Lubuklinggau
- (c) Merekrut para personil agar bisa diberikan model dan ciri khas senam “Linggau BISA” tersebut
- (d) Meregulasikan hasil dari ciptaan senam tersebut pada saat acara pembukaan (*opening*) dan penutupan (*closing*) dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015.

f) Penyelenggaraan peserta senam massal

Sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu, bahwasannya didalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV diharapkan menciptakan senam “Linggau BISA”, oleh karena itulah setelah terciptanya senam “Linggau BISA” dan telah ditampilkan pada acara pembukaan (*openning*) dan penutupan (*closing*) penyelenggaraan kegiatan PORPROV. Personil para peserta senam “Linggau BISA” semuanya diambil dari siswa-siswi yang masih jenjang pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), harapannya adalah apabila diambil dari tingkatan sekolah tersebut, para siswa-siswa bisa menerapkan apa yang mereka dapat dan ketahui dari pembelajaran senam “Linggau BISA”.

Peserta senam “Linggau BISA” ini kesemua personilnya berjumlah 1000 (seribu) orang dan ditampilkan pada acara pembukaan (*opening*) dan penutupan (*closing*) dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015.

- g) Penyelenggaraan penyediaan jasa bongkar pasang sarana dan prasarana pendukung kegiatan PORPROV tahun 2015

Agar mempercepat segala persiapan sarana dan prasana, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau menggunakan jasa untuk bongkar pasang sarana dan prasarana Dalam implementasinya sudah sangat baik yang terdiri dari :

- (1) Penyelenggaraan jasa bongkar pasang sarana dan prasarana pada cabang olahraga atletik
 - (2) Penyelenggaraan jasa bongkar pasang sarana dan prasarana pada cabang olahraga senam
 - (3) Penyelenggaraan jasa bongkar pasang sarana dan prasarana pada cabang olahraga tinju
 - (4) Penyelenggaraan jasa bongkar pasang sarana dan prasarana pada cabang olahraga panjat tebing
 - (5) Penyelenggaraan jasa bongkar pasang sarana dan prasarana pada cabang olahraga tenis meja
 - (6) Penyelenggaraan jasa bongkar pasang sarana dan prasarana pada cabang olahraga sepak takraw
 - (7) Penyelenggaraan jasa bongkar pasang sarana dan prasarana pada cabang olahraga karate dan taekwondo
 - (8) Penyelenggaraan jasa bongkar pasang sarana dan prasarana pada cabang olahraga biliard
- h) Penyelenggaraan tenaga ahli lokal atau pembentukan panitia lokal daerah

Guna menunjang kinerja dinas pemuda olahraga Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV, semua unsur pemerintahan yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lubuklinggau

dilibatkan, tenaga-tenaga ahli atau panitia lokal daerah yang dibentuk ada 2 (dua) divisi, adapun keterlibatan panitia local ini yaitu :

(1) Panitia lokal daerah

Untuk suksesnya penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau serta menunjang kinerja dinas pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau yang dalam hal ini sebagai leading sector dibidang kepemudaan dan keolahragaan, maka dibentuklah panitia lokal daerah yang melibatkan semua personil dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Lubuklinggau yang dibuatkan surat keputusan waliKota Lubuklinggau nomor : 101/KPTS/DISPORA/2015 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 Di Kota Lubuklinggau, susunan kepanitiaan terlampir

(2) Penyelenggaraan jasa keamanan / panitia keamanan

Guna menunjang terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau, dinas pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau meminta dukungan bantuan personality yang akan ditugaskan pada seksi keamanan. Pada seksi keamanan ini yang dilibatkan, antara lain :

- (a) Polres Kota Lubuklinggau
- (b) Kodim 0406 Kota Lubuklinggau
- (c) Brimob Kota Lubuklinggau
- (d) Satuan pamong praja Kota Lubuklinggau

i) Penyelenggaraan penyediaan barang cetak dan penggandaan

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya dalam setiap suatu penyelenggaraan akan sangat diperlukan barang-barang cetakan dan iklan-iklan ataupun informasi guna mempromosikan atau menginformasikan suatu kegiatan, penyelenggaraan kegiatan ini yang telah berhasil dilaksanakan adalah :

- (1) Penyelenggaraan penyediaan spanduk
 - (2) Penyelenggaraan penyediaan umbul-umbul
 - (3) Penyelenggaraan penyediaan baleho ukuran 10m x 5m
 - (4) Penyelenggaraan penyediaan banner ukuran 90cm x 6m
 - (5) Penyelenggaraan penyediaan banner ukuran 15m x 6m
 - (6) Penyelenggaraan penyediaan balon udara besar
 - (7) Penyelenggaraan penyediaan *one way*
 - (8) Penyelenggaraan penyediaan branding kendaraan roda 4 (empat)
 - (9) Penyelenggaraan penyediaan *back drop*
- j) Penyediaan sewa gedung

Sebagaimana telah diungkapkan pada BAB I salah satu permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau adalah masih kurangnya *venue* tempat pertandingan, maka dalam penyelenggaraan kinerja dinas pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau salah satunya menyiapkan *venue* tempat pertandingan dengan menyewa gedung-gedung serbaguna dari pihak swasta, gedung-gedung yang disewa antara lain :

- (1) Penyelenggaraan sewa tempat pertandingan cabang olahraga *bridge*

Gedung yang disewa untuk *venue* tempat pertandingan cabang olahraga *bridge* menggunakan ruang serbaguna hotel abadi lubuklinggau

- (2) Penyelenggaraan sewa tempat pertandingan cabang olahraga catur

Gedung yang disewa untuk venue tempat pertandingan cabang olahraga catur menggunakan ruang serbaguna hotel smart lubuklinggau

(3) Penyelenggaraan sewa tempat pertandingan cabang olahraga senam

Gedung yang disewa untuk venue tempat pertandingan cabang olahraga senam menggunakan gedung serbaguna ICM kota lubuklinggau

(4) Penyelenggaraan sewa tempat pertandingan cabang olahraga cabang olahraga karate dan cabang olahraga taekwondo serta cabang olahraga billiard

Gedung yang disewa untuk venue tempat pertandingan cabang olahraga karate, taekwondo dan billiard menggunakan gedung serbaguna bagasraya yadika kota Lubuklinggau

Selain penyelenggaraan sewa gedung untuk pertandingan cabang olahraga, dinas pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau juga melaksanakan penyelenggaraan sewa gedung untuk tempat penginapan para panitia penyelenggaraan kegiatan PORPROV dari propinsi sumatera selatan, dikarenakan yang tergabung dalam kepanitiaan cukup banyak, maka penyelenggaraan tempat penginapan para panitia terbagi-bagi, diantaranya :

- (1) Kamar-kamar hotel yang ada di Kota Lubuklinggau
- (2) Asrama-asrama pada bandiklat Kota Lubuklinggau
- (3) Rumah-rumah penduduk yang ada di Kota Lubuklinggau

k) Penyelenggaraan penyediaan sewa sarana mobilitas dan sewa perlengkapan gedung serta peralatan gedung kantor

(1) Sarana mobilitas

Dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 ini dinas pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau memberikan sarana fasilitas kendaraan roda 4 (empat), kendaraan-kendaraan ini dipergunakan oleh panitia dan diperuntukkan bagi para masing-masing kontingen setiap cabang olahraga

(2) Penyelenggaraan sewa perlengkapan gedung kantor dan peralatan gedung kantor

Keterbatasan sarana penunjang bagi panitia penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 juga terdapat pada sektor perlengkapan dan peralatan gedung kantor, guna menunjang kinerja panitia penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 serta keterbatasan anggaran yang dimiliki, maka dinas pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau menyelenggarakan beberapa indikator penunjang, diantaranya :

- (a) Penyelenggaraan sewa meja dan kursi untuk tempat pertandingan
- (b) Penyelenggaraan sewa komputer dan printer untuk tempat pertandingan
- (c) Penyelenggaraan sewa mesin listrik (genset) untuk tempat pertandingan
- (d) Penyelenggaraan sewa tenda untuk tempat pertandingan sekaligus digunakan sebagai tenda pada saat pembukaan (openning) dan penutupan (closing) dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV
- (e) Penyelenggaraan sewa sound system untuk tempat pertandingan
- (f) Penyelenggaraan sewa AC untuk tempat pertandingan cabang olahraga senam

- (g) Penyelenggaraan sewa karpet penutup lantai untuk tempat pertandingan cabang olahraga senam
- (h) Penyelenggaraan sewa pagar pembatas untuk tempat pertandingan cabang olahraga karate, pencak silat dan taekwondo
- (i) Penyelenggaraan sewa kipas angin untuk tempat pertandingan cabang olahraga tinju
- (j) Penyelenggaraan sewa HT untuk komunikasi para panitia di setiap cabang olahraga

l) Penyelenggaraan penyediaan konsumsi

Dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV ini, pemerintah Kota Lubuklinggau menjamin semua kebutuhan konsumsi untuk kontingen yang teranggarkan pada dinas pemuda dan olahraga yang merupakan salah satu indikator dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015, konsumsi yang disiapkan oleh dinas pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau terdiri dari :

- (1) Snack untuk pembukaan (*opening*) dan penutupan (*closing*) dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 yang disediakan sebanyak 1.500 kotak
- (2) Snack selama penyelenggaraan kegiatan untuk cabang olahraga yang disediakan sebanyak 12.075 kotak/cabor/hari
- (3) Makan panitia selama penyelenggaraan kegiatan PORPROV yang disediakan sebanyak 3.500 kotak/hari
- (4) Kosumsi ramah tamah selama penyelenggaraan kegiatan PORPROV yang disediakan sebanyak 2.000 porsi

- (5) Makan malam kontingen dan panitia selama penyelenggaraan kegiatan PORPROV yang disediakan sebanyak 35.000 porsi/hari
 - (6) Penyediaan air mineral selama penyelenggaraan kegiatan PORPROV yang disediakan sebanyak 800 dus
 - (7) Konsumsi rapat dan pertemuan teknis selama penyelenggaraan kegiatan PORPROV yang disediakan sebanyak 1.200 kotak
- m) Penyelenggaraan penyediaan pakaian olahraga peserta senam massal “Linggau BISA” dan pakaian panitia lokal daerah

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau, Walikota Lubuklinggau mengharapkan terciptanya senam “Linggau BISA”, maka dari itu setelah terciptanya senam “Linggau BISA” serta sumber daya manusianya didapat, dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 kepada semua sumber daya manusia yang termasuk di dalam peserta senam “Linggau BISA” diberikan pakaian seragam agar terciptanya keserasian dan keseragaman, begitu juga untuk mempermudah dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 setiap panitia diberikan pakaian seragam kepanitiaan yang akan menjadikan tanda khusus sebagai panitia penyelenggaraan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau

- n) Penyelenggaraan pengadaan maskot/souvenir maskot PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau

Untuk memberikan kenang-kenangan bahwasannya penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau, maka melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dianggarkan pembelian

souvenir/maskot PORPROV yang diperuntukkan pembagiannya kepada para kontingen dari daerah kabupaten/kota dalam wilayah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

d. Penyelenggaraan penyediaan barang yang akan dijadikan aset tetap daerah

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) sebenarnya merupakan agenda rutinitas provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali, untuk pelaksanaan PORPROV tahun 2015 ditunjuklah Kota Lubuklinggau sebagai tuan rumah dan juga sebagai tuan rumah yang pertama sekali dalam penyelenggaraan PORPROV diluar ibukota provinsi yaitu kota Palembang, dinas pemuda dan olahraga yang merupakan sebagai *leading sector* bagian keolahragaan mem-*backup* kekurangan prasarana dan sarana olahraga yang belum ada, yang dalam penyelenggaraan indikator ini akan dijadikan sebagai belanja modal atau aset tetap daerah, aset yang telah dijadikan aset tetap daerah tersebut, yaitu :

a) Penyelenggaraan penyediaan barang peralatan umum

Dalam penyelenggaraan indikator ini terdiri dari :

- (1) Pengadaan tangga juara
- (2) *Scoring board* tenis lapangan
- (3) Pembuatan tanda *start* dan *finish* cabang olahraga sepeda
- (4) Triplek 10 mm untuk cabang olahraga sepak takraw
- (5) *Bench* cadangan untuk cabang olahraga sepakbola
- (6) *Bench* PP untuk cabang olahraga sepakbola
- (7) Dispenser disetiap tempat pertandingan

- (8) Karpet penutup lantai untuk cabang olahraga sepak takraw
- (9) *Ring hop* untuk cabang olahraga sepak takraw
- (10) Pagar pembatas dan *score table* untuk cabang olahraga billiard
- (11) *Score table* untuk cabang olahraga sepak takraw
- (12) Papan pengumuman tempat pertandingan
- (13) *Box es* untuk cabang olahraga tenis lapangan
- (14) *Box es* untuk cabang olahraga voli pasir
- (15) Payung besar untuk cabang olahraga tenis lapangan, cabang olahraga panjat tebing, cabang olahraga voli pasir
- (16) Terpal lapangan outdoor untuk cabang olahraga sepak takraw
- (17) Terpal penutup atap untuk cabang olahraga senam
- (18) Gordeng gedung sepak takraw
- (19) Kain sekat untuk cabang olahraga tenis lapangan
- (20) Galon air untuk di setiap cabang olahraga
- (21) Sarung tangan untuk cabang olahraga billiard
- (22) Tedmond untuk dilokasi pertandingan
- (23) Papan penunjuk jalan untuk cabang olahraga sepeda
- (24) *Stop watch*
- (25) *Box es* dan lonceng untuk cabang olahraga panjat tebing
- (26) Magnesium karbonat untuk cabang olahraga panjat tebing
- (27) Bor elektrik untuk cabang olahraga panjat tebing

b) Penyelenggaraan pembangunan *venue* lapangan bolla voli pasir

Dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV, untuk *venue* lapangan bolla voli pasir memang belum adanya, maka dari itu dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 dibangunlah *venue* lapangan bolla voli pasir

c) Penyelenggaraan pembangunan cabang olahraga atletik

Seyogyanya *venue* atletik telah ada tetapi untuk digunakan dalam penyelenggaraan PORPROV tahun 2015 belum memenuhi standarisasi yang ditentukan, maka dari itu dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015 direnovasi guna memenuhi standarisasi yang telah ditentukan dan layak untuk dipakai

d) Penyelenggaraan kelengkapan sarana cabang olahraga renang

Kelengkapan sarana cabang olahraga renang yang ada pada saat penyelenggaraan PORPROV tahun 2015 belum memenuhi syarat, maka dari itu dinas pemuda dan olahraga mengadakan kekurangan sarana-sarana yang di perlukan pada cabang olahraga renang, yang terdiri dari :

- (1) Pengadaan *air conditioner* (AC)
- (2) *Locker room* untuk para atlit
- (3) Meubeler pada cabang olahraga renang
- (4) Tiang jarang pada kolam renang

e) Penyelenggaraan pengecatan lantai lapangan cabang olahraga tenis lapangan

Dalam penyelenggaraan indikator ini yang dilakukan dinas pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau mengecat kembali lapangan cabang olahraga tenis lapangan

f) Penyelenggaraan pengecatan lantai lapangan cabang olahraga basket

Untuk cabang olahraga basket, dinas pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau melaksanakan pengecatan lapangan dan dinding pada gedung tempat pertandingan, dikarenakan tempat venue olahraga basket dilaksanakan didalam gedung

g) Penyelenggaraan penyediaan pengadaan alat-alat olahraga lainnya

Kelengkapan sarana dan prasarana suatu cabang olahraga sangat diperlukan guna terlaksananya pertandingan, ada beberapa sarana dan prasarana alat olahraga yang dipersiapkan oleh dinas pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015, yaitu :

- (1) Matras untuk cabang olahraga karate, pencak silat, taekwondo, kempo dan wushu
- (2) Net untuk cabang olahraga tenis lapangan, tenis meja, bola voli, bulu tangkis, voli pasir
- (3) Meja untuk cabang olahraga tenis meja
- (4) Ring basket untuk cabang olahraga basket
- (5) Jaring gawang untuk cabang olahraga sepak bola
- (6) Meja billiard
- (7) Papan catur dan jam catur
- (8) Biding card untuk cabang olahraga bridge
- (9) Sasaran bidik untuk cabang olahraga tembak
- (10) *Board bridge* untuk cabang olahraga bridge
- (11) Plastik komputer card
- (12) Tali carmentel untuk cabang olahraga panjat tebing
- (13) Point untuk cabang olahraga panjat tebing

3. Kinerja organisasi pada aspek *output*

Kelompok keluaran (*output*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau, ukuran kegiatannya adalah terselenggaranya seluruh kegiatan yang telah direncanakan tanpa ada hambatan. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan berbeda dengan yang telah direncanakan dan juga dengan yang diharapkan. Kesiapan pihak penyelenggara dalam melaksanakan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau mengalami banyak kendala sehingga berpengaruh pada hasil yang dicapai. Hal tersebut tampak pada belum matangnya persiapan *venue* dan penginapan sehingga berpengaruh kepada pembengkakan biaya anggaran dan juga ketidaksiapan panitia penyelenggara dalam menyiapkan penginapan berpengaruh kepada para atlet yang akan bertanding karena hanya ditempatkan dirumah-rumah penduduk yang disewa dan juga tempatnya yang kecil sehingga banyak yang harus berpisah dengan tim kontingennya.

4. Aspek *outcome*

Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung dengan kata lain *outcome* adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Outcome dari penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau adalah terlaksananya seluruh kegiatan dengan maksimal tanpa ada kendala sehingga Kota Lubuklinggau dapat

dinilai sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 yang terbaik dan juga dapat memberikan kepuasan kepada seluruh atlit dan official yang datang ke untuk berkompetisi di kota lubuklinggau.

Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena terdapat beberapa kekurangan dalam penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau khususnya yang dirasakan oleh para atlit dan official yang hanya ditempatkan dirumah-rumah penduduk sehingga membuat para atlit dan official merasa kurang nyaman. Selain permasalahan penginapan, permasalahan lain yang muncul adalah dengan adanya venue yang belum selesai sehingga mengakibatkan para peserta kurang nyaman dalam melaksanakan pertandingan, seharusnya panitia penyelenggra dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau dapat lebih siap dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PORPROV tahun 2015, apalagi venue adalah merupakan sarana yang vital dalam pelaksanaan PORPROV ini.

Dari permasalahan anggaran juga menimbulkan dampak, yakni pembengkakan anggaran yang diakibatkan oleh adanya kekurangan dalam melakukan perhitungan menyebabkan pembebanan anggaran pada tahun berikutnya karena kekurangan anggaran dana pada pelaksanaan PORPROV tahun 2015, ini akan dibebankan pada anggran tahun berikutnya sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi pos anggran tahun berikutnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau tidak ekonomis, tidak efektif dan tidak efisien.

5. Aspek *benefit*

Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Kota Lubuklinggau dengan adanya penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau ini adalah terlaksananya PORPROV dengan efektif dan efisien, namun kenyataan akhirnya berbeda dengan harapan. Meskipun pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau sukses menggelar 24 cabang olahraga dimainkan pada even tersebut, namun ada beberapa masalah yang muncul seperti dana atau anggaran yang kurang dikarenakan kurang hati-hati dalam penyusunan pos belanja dan juga penginapan atlet yang kurang memadai sehingga harus menyewa rumah-rumah warga untuk penginapan.

Namun selain hal negatif yang disebutkan diatas, terdapat pula banyak hal positif ataupun keuntungan yang didatangkan atau ditimbulkan dengan adanya PORPROV ini, yakni diantaranya dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Lubuklinggau untuk menyaksikan secara langsung kegiatan PORPROV dikotanya, terjadinya perputaran uang yang luar biasa pada saat pelaksanaan PORPROV, meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Lubuklinggau dan juga dapat memperkenalkan potensi daerah pada saat menjadi tuan rumah penyelenggara PORPROV.

6. Aspek *Impact*

Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan dari suatu kegiatan baik positif maupun negatif.

- 1) Dampak positif, dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan PORPROV di Kota Lubuklinggau diantaranya:
 - a. Meningkatnya pendapatan masyarakat, misalnya bagi penyedia jasa penginapan omsetnya akan naik dibandingkan pada hari-hari biasa sebelum adanya kegiatan PORPROV, para pedagang disekitar lokasi pelaksanaan PORPROV juga akan mengalami peningkatan penghasilan karena akan banyak orang yang datang dan melakukan transaksi jual beli
 - b. Kota Lubuklinggau dapat memperkenalkan potensi-potensi yang mereka miliki pada pelaksanaan PORPROV berlangsung, sehingga orang-orang akan tahu potensi apa saja yang dimiliki oleh Kota Lubuklinggau sehingga ajang PORPROV ini juga dapat sekalan menjadi ajang promosi bagi Kota Lubuklinggau.
- 2) Dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan PORPROV yang diadakan di Kota Lubuklinggau diantaranya adalah:
 - a. Terjadinya pembebanan anggaran untuk tahun berikutnya, karena dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan PORPROV pada tahun tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran sehingga harus dibebankan pada anggaran tahun berikutnya. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pos anggaran kegiatan lain yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, dikarenakan akan dilakukan pemangkasan anggaran untuk menutupi kekurangan anggaran pada penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015.
 - b. *Venue* yang belum rampung secara keseluruhan mengakibatkan para atlet yang bertanding merasa kurang maksimal.

- c. Keadaan penginapan yang tidak sesuai karena hanya menyewa rumah masyarakat menyebabkan para atlit dan ofisial merasa kurang nyaman karena sempit dan sebagainya.

Uraian diatas menjelaskan bagaimana kinerja DISPORA Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi yang dilihat dari sisi pelaksanaanya.

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau

Menurut Lusthaus (dalam Kurniawati, 2010:97), Faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah :

a. Lingkungan Eksternal,

Dimensi kunci yang dapat mempengaruhi lingkungan adalah lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan adminstratif, aturan, kebijakan, budaya sosial, ekonomi, teknologi. Dapat disingkat menjadi peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sarannya; sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sarannya. Dalam mengamati lingkungan eksternal, ada beberapa sektor yang peka secara strategi, artinya bisa menciptakan peluang, atau sebaliknya merupakan ancaman. Perkembangan teknologi misalnya, peraturan perundang-undangan, atau situasi keuangan,dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi.

b. Motivasi organisasi,

hal yang memotivasi organisasi adalah sejarah, misi, budaya, insentif atau imbalan.

c. Kapasitas organisasi,

terdiri dari Strategi kepemimpinan, Sumber daya manusia, Manajemen keuangan, Proses organisasi, Program manajemen, Infrastruktur, dan Rantai institusional. Kekuatan organisasi terletak pada saat situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategi dalam mencapai sasarannya; sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau kebanyakan ditinjau dari kapasitas organisasinya yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja menurut Milles dan Hubberman, dia menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang digunakan, yaitu:

1. *Input*
2. *Output*
3. *Outcome*
4. *Benefit*
5. *Impact*

Kelima indikator pengukuran kinerja diatas akan digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau

sehingga dapat diketahui apakah penyelenggaraan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau sudah berhasil apa belum dan juga agar dapat diketahui faktor apa yang menyebabkan ketidakberhasilannya. Berikut penjelasan mengenai indikator yang mempengaruhi penyelenggaraan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau:

1. *Input*, dalam penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau dapat diketahui bahwa pelaksanaannya belum efektif dan efisien karena masih terdapat banyak kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan diantaranya:
 - a. Anggaran yang tidak mencukupi pada saat pelaksanaan, hal ini disebabkan oleh perencanaan anggaran yang tidak matang sehingga ada poin-poin yang tidak diperhitungkan dalam menghadapi penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau seperti lapangan tembak dan lapangan futsal yang tidak dapat diselesaikan sehingga untuk mengejar target pelaksanaannya harus dimasukkan pada anggaran belanja tahun berikutnya.
 - b. Kesiapan penginapan, penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau meninggalkan kesan yang tidak baik khususnya bagi para atlit dan official yang tidak mendapatkan penginapan sesuai dengan standar, pasalnya penginapan yang disiapkan oleh pihak penyelenggara tidak mencukupi untuk menampung seluruh atlit dan official sehingga mereka ditempatkan pada rumah-rumah penduduk yang disewa sebagai tempat menginap selama penyelenggaraan PORPROV berlangsung.

- c. Lapangan cabang olahraga bilyard dan karate yang pelaksanaannya masih menyewa gedung Bagasraya Yadika, seharusnya pemerintah memiliki gedung sendiri yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan cabang olahraga bilard dan karate sehingga tidak perlu menyewa gedung.
2. *Process*, Proses pelaksanaan PORPROV sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan mulai dari pembukaan acara, pelaksanaan pertandingan cabang olahraga yang sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan sampai kepada penutupan acara, semua berjalan dengan baik namun di sbeberapa bagian dalam proses pelaksanaan secara keseluruhan tersebut masih terkendala terkait dengan kurangnya anggaran dan ketidaksiapan beberapa *venue* seperti *venue* lapangan tembak dan futsal yang masih kurang beberapa kelengkapan seperti untuk lapangan tembak tribun tempat penonton hanya menggunakan tenda, stage (tempat menembak belum ada). Hal ini dikarenakan persiapan yang kurang memadai dimana pada saat proses pembebasan lahan untuk pembuatan venue ini mengalami hambatan dan tarik ulur dengan pemilik lahan sehingga membuat waktu persiapan menjadi sangat singkat hanya dua minggu, maka dari itu proses persiapan venue ini tidak sampai seratus persen sehingga dianggap kurang memenuhi standar lapangan tembak nasional. Kemudian untuk venue futsal juga mengalami kendala dimana kondisi lapangan futsal tersebut merekondisikan lapangan tenis yang ada kemudian dijadikan lapangan futsal, dikarenakan biaya yang kurang memadai untuk membuat lapangan futsal yang baru maka lapangan tenis pada akhirnya menjadi pilihan untuk dibuat venue futsal yang pada akhirnya juga kuran g memenuhi standar nasioal

diantaranya tidak tersedianya tribun penonton dan official dan kondisi lapangan yang kurang nyaman.

3. *Output*, dalam penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau *output* diukur dari ketersediaan sarana dan prasarana yang akan digunakan para peserta dalam pelaksanaan kegiatan PORPROV berlangsung. Ada beberapa ketersediaan sarana dan prasarana sebagai objek dalam *output* ini yang belum maksimal, hal tersebut diantaranya ketersediaan penginapan yang tidak mencukupi dan juga kondisi dua buah lapangan yang belum selesai 100% proses pengerjaannya.
4. *Outcome*, dalam aspek ini berawal dari kejelian mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau *outcome* dapat diketahui dengan melihat sejauh mana kemampuan birokrasi yakni penyelenggara PORPROV dan juga pemerintahan yang terkait dengan kegiatan untuk mengenali apa saja yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan acara PORPROV tersebut. Pemerintah dan pihak penyelenggaraan seharusnya mampu untuk menyediakan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta dalam menghadapi PORPROV, pada kenyataan yang terjadi dilapangan tidak demikian pasalnya ada beberapa hal yang tidak dapat dipenuhi yakni:
 - a. Lapangan tembak dan lapangan futsal yang belum selesai

- b. Penginapan yang tidak sesuai dengan standar, para atlit dan *official* yang hanya ditempatkan dirumah-rumah penduduk sehingga membuat para atlit dan *official* merasa kurang nyaman
5. *Benefit*, untuk hal ini sudah cukup baik karena sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi hanya saja kurang jeli dalam melakukan analisa anggaran yang akan dibutuhkan dan juga terjadinya hal-hal yang tidak terduga dilapangan sehingga menimbulkan sedikit masalah misalnya tarif penginapan yang naik dan tidak diprediksikan sebelumnya sehingga dana atau anggaran yang kurang dikarenakan kurang hati-hati dalam penyusunan pos belanja dan juga penginapan atlit yang kurang memadai sehingga harus menyewa rumah-rumah warga untuk penginapan.
6. *Impact*, dalam penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau dibuat bukan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan acara yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan bukan berdasarkan kepentingan pemimpin, jadi dapat dikatakan bahwa *impact* dalam penyelenggaraan PORPROV Kota Lubuklinggau sudah baik karena berpengaruh dan membuat Kota Lubuklinggau menjadi pusat perhatian selama kegiatan berlangsung. Namun ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan PORPROV yang diadakan di Kota Lubuklinggau diantaranya adalah:
 - a. Terjadinya pembebanan anggaran untuk tahun berikutnya karena dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan PORPROV pada tahun tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran sehingga harus dibebankan pada anggaran tahun berikutnya. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pos

anggaran kegiatan lain yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dikarenakan akan dilakukan pemangkasan anggaran untuk menutupi kekurangan anggaran pada penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015.

- b. *Venue* yang belum rampung secara keseluruhan mengakibatkan para atlet yang bertanding merasa kurang maksimal.
- c. Keadaan penginapan yang tidak sesuai karena hanya menyewa rumah masyarakat menyebabkan para atlet dan ofisial merasa kurang nyaman karena sempit dan sebagainya.

8. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015

Dalam penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya:

a). Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau diantaranya adalah:

1) Dukungan anggaran

Pelaksanaan kegiatan akbar dalam bidang olahraga tingkat provinsi ini tentunya membutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit sehingga dibutuhkan dukungan dari pihak-pihak terkait untuk mensukseskan acara tersebut. Dalam penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau anggaran dana yang digunakan berasal dari Anggaran Belanja KONI Provinsi Sumatera Selatan, APBD Kota Lubuklinggau dan juga sumbangan

dari pihak-pihak terkait sebagaimana yang tercantum pada Surat Keputusan Ketua Umum KONI provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yang menetapkan bahwa :

“ Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja KONI Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan Tahun 2015, APBD Kota Lubuk Linggau, dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat”.

Sehingga dengan dukungan anggaran dana tersebut panitia pelaksana dapat menyelenggarakan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau dengan sukses.

2) Dukungan pemerintah provinsi dan pihak-pihak terkait

Pemerintah provinsi dan juga KONI Sumatera Selatan senantiasa bekerjasama dalam mensukseskan penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau mulai dari bantuan anggaran dan dana dan juga motivasi agar KONI Lubuklinggau dapat mensukseskan gelaran acara olahraga akbar ini.

3) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini adalah panitia penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau yang senantiasa bekerja keras untuk mensukseskan PORPROV Tahun 2015 mulai dari opening, pelaksanaan dan juga closing.

Untuk mensukseskan acara tersebut dibentuklah Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) tahun 2015 di Kota Lubuklinggau, yang dibagi menjadi membagi 6 (enam) deputi dan di SK kan oleh Walikota Lubuklinggau, diantaranya:

- 1) Deputi I : Sport & Venue
- 2) Deputi II : Media, IT dan Promosi

- 3) Deputi III : Pendukung (Support)
- 4) Deputi IV : Ceremony
- 5) Deputi V : Keamanan
- 6) Deputi VI : Penanggung Jawab Cabang Olahraga

Keenam deputi tersebut terus bekerja keras sesuai dengan tupoksinya masing-masing untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau ini.



Gambar 4.1. Arsip Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau
Sumber : Palembang Ekspres, 1 Juni 2015

b). Faktor-faktor penghambat

1) Penyusunan anggaran

Proses penyusunan anggaran penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau dinilai belum maksimal karena masih terdapat kekurangan-kekurangan terutama yang berkaitan dengan

anggaran pada saat kegiatan berlangsung. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau. Menurut beliau penginapan mengalami perubahan harga dan juga penambahan unit, sehingga pihak pengawas kesulitan dalam memenuhi kebutuhan penginapan untuk para atlet dan official sehingga harus menyewa rumah-rumah penduduk untuk pemenuhannya. Dalam pelaksanaan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau ada 13 rumah penduduk yang disewa untuk tempat menginap para atlet peserta PORPROV dengan harga yang berbeda mulai dari harga Rp. 1.000.000,- sampai dengan harga Rp. 10.000.000,-

Tabel 4.1
Daftar Rumah Penduduk Yang di Sewa Sebagai Penginapan Atlet

No.	Nama Pemilik Rumah	Harga Sewa (Rp)
1.	Burhan/Sherliza	10.000.000
2.	Gustianto	5.000.000
3.	Yuli	3.500.000
4.	Tri Mulyani	3.000.000
5.	Carolin	1.000.000
6.	Sunarto	1.000.000
7.	Majid Karim	1.000.000
8.	Siti Aminah	5.000.000
9.	Rudi Indarto	3.000.000
10.	Mansur Daniel	3.000.000
11.	Maliki Umar	3.000.000
12.	Marwan	4.000.000
13.	Mori	6.500.000

Sumber: Dispora Kota Lubuklinggau

2) Sarana olahraga yang belum selesai

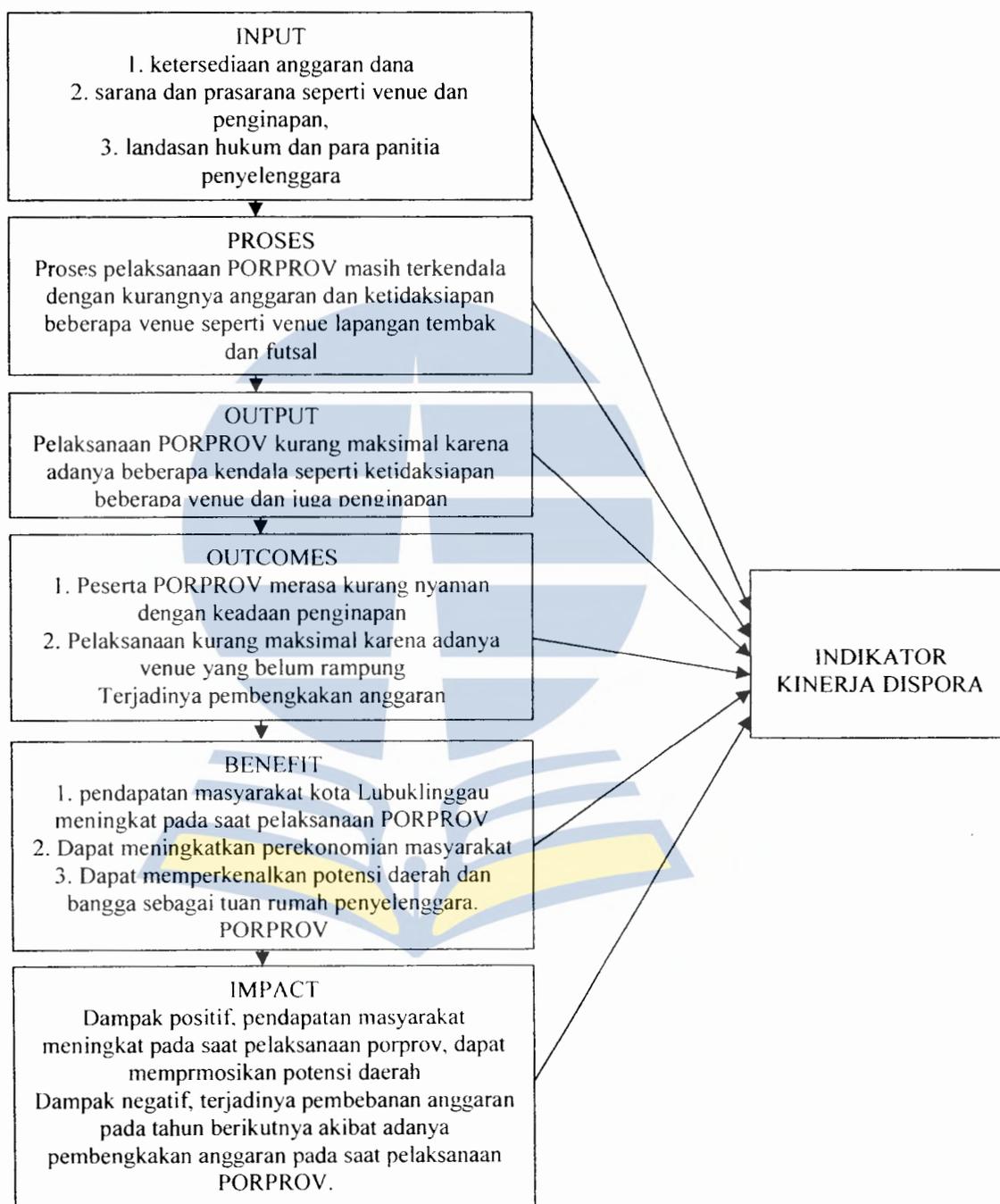
Faktor lain yang menjadi penghambat tidak optimalnya penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau adalah terhambatnya pelaksanaan pembangunan dua buah venue yakni Lapangan futsal dan lapangan tembak. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau. Diperoleh informasi bahwa Pada saat pelaksanaan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau memang masih ada beberapa kekurangan yang terjadi seperti adanya dua buah lapangan yang belum selesai 100% proses pengerjaannya yakni lapangan tembak dan juga lapangan futsal sehingga dirasa kurang optimal dalam pelaksanaannya, namun untuk venue-venue yang lainnya sudah siap semua.

3) Harga sewa penginapan yang berubah dan penambahan unit

Panitia penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau harus menyiapkan penginapan yang akan dipakai oleh para atlit dan juga official yang akan berlaga pada PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau yang akan diikuti oleh 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan yang digelar pada tanggal 24 sampai dengan 30 mei 2015 dimana sebanyak 24 cabang olahraga dipertandingkan.

Untuk memenuhi kebutuhan penginapan tersebut pihak panitia penyelenggara kesulitan dalam memenuhinya dikarenakan terjadinya perubahan harga penginapan dan juga adanya penambahan unit. Untuk menyiasati permasalahan tersebut maka pihak penyelenggara memutuskan untuk menyewa rumah-rumah warga untuk dijadikan tempat menginap bagi atlit dan official yang tidak mendapatkan penginapan.

Secara ringkas temuan-temuan kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Luuklinggau pada saat pelaksanaan kegiatan PORPROV tahun 2015 di Lubuklinggau dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.2: Kinerja DISPORA Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan PORPROV

Berikut juga hasil rekapitulasi hasil analisis secara keseluruhan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 4.2. Rekapitulasi Hasil Analisis Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV tahun 2015

Dimensi	Indikator	Hasil
Faktor-Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan PORPROV 2015	1.Faktor Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran Dukungan anggaran yang dilakukan oleh KONI Provinsi sumsel dan juga APBD Kota Lubuklinggau serta sumbangan-sumbangan dari pihak luar sangat membantu terselenggaranya kegiatan PORPROV Kota Lubuklinggau tahun 2015 - Dukungan pemerintah provinsi dan pihak-pihak terkait Pemerintah provinsi dan juga KONI Provinsi Sumsel sangat mendukung dan membantu dalam pelaksanaan PORPROV - Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dispora Kota Lubuklinggau dan juga masyarakat lubuk linggau yang bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan PORPROV.
	2.Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan anggaran Penyusunan anggaran yang dilakukan untuk pelaksanaan PORPROV Kota Lubuklinggau tahun 2015 belum matang, karena masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. - Sarana olahraga yang belum selesai Terdapa dua buat lapangan yang belum selesai yakni lapangan futsal dan lapangan tembak - Harga sewa penginapan yang berubah dan penambahan unit Jumlah penginapan mengalami penambahan unit dan juga terjdai perubahan harga sehingga kebutuhan penginapan sulit untuk dipenuhi dan harus menyewa rumah penduduk untuk tempat menginap para atlit

Sumber : Diolah Penulis, 2016

Menurut Lusthaus (dalam Kurniawati, 2010:97), salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah kapasitas organisasi, terdiri dari strategi kepemimpinan, sumber daya manusia, manajemen keuangan, proses organisasi, program manajemen, infrastruktur, dan rantai institusional. Kekuatan organisasi terletak pada saat situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategi dalam mencapai sasarannya yang kemudian dapat dikatakan sebagai faktor pendukung kinerja organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor-faktor penghambat diatas merupakan bentuk tidak tercapainya sasaran kegiatan.

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan pasti memiliki kendala, baik itu kendala yang besar maupun kendala yang kecil, namun setelah itu maka dari itu dilakukan evaluasi untuk melihat dan menganalisa dimana letak kekurangan atau kesalahan tersebut. Begitu pula halnya dengan penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau yang masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Menyikapi hal tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau akan mengadakan perbaikan setelah evaluasi untuk memperbaiki apa saja kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau sehingga dapat dijadikan koreksi dan acuan untuk memperbaiki kinerja agar dapat lebih siap dan lebih baik lagi apabila mengadakan kegiatan yang serupa. Menurut Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau diperoleh informasi bahwa, akan melakukan

evaluasi terkait dengan pelaksanaan PORPROV tahun 2015 di Kota Lubuklinggau khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sehingga dapat diketahui letak kelemahannya agar dapat diperbaiki untuk persiapan dalam melakukan kegiatan yang serupa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan pada BAB IV, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a. Kinerja Organisasi pada aspek input:

pembengkakan anggaran dana tak terduga, diantaranya adalah belum adanya gedung untuk cabang olahraga *bilyard* dan *karate* sehingga dalam pelaksanaannya masih menyewa gedung Bagasraya Yadika dan dalam penyewaan yang dilakukan belum termasuk didalamnya sarana pendingin ruangan (AC) sehingga pihak penyelenggara harus mengeluarkan tambahan dana.

b. Kinerja organisasi pada aspek proses

Seluruh kegiatan pada aspek proses sudah berjalan sebagaimana mestinya.

c. Kinerja organisasi pada aspek *output*

a. Sarana olahraga yang belum selesai, masih terdapat dua *venue* yang terhambat penyelesaiannya sehingga sampai pada waktu penyelenggaraan PORPROV kedua *venue* tersebut belum rampung 100% dan hal itu mengakibatkan ketidaknyamanan pada saat event berlangsung.

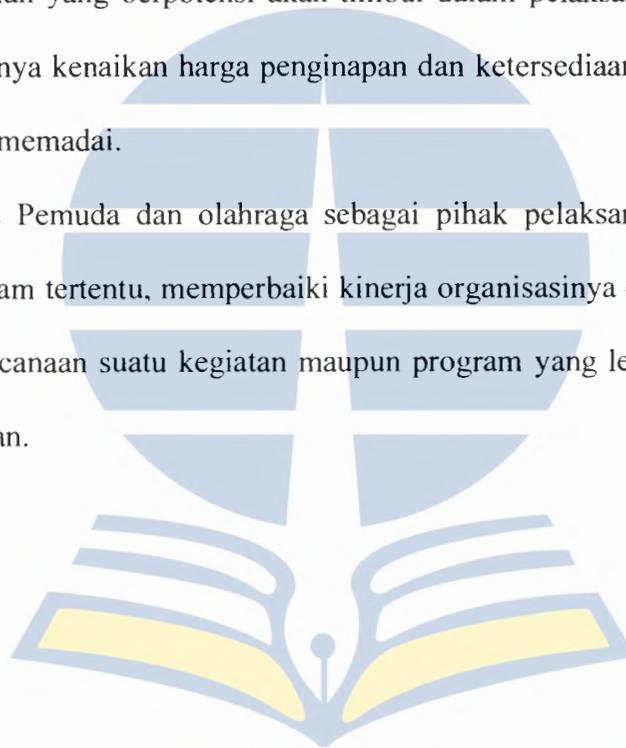
b. Penginapan para Atlet dan Official yang belum terpenuhi

adanya kenaikan harga penginapan dan juga adanya penambahan jumlah unit sehingga panitia harus mensiasinya dengan menyewa rumah penduduk sebagai tempat menginap bagi para atlit dan official.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dari penelitian ini adalah:

- a. Dinas Pemuda dan olahraga Kota Lubuklinggau harus lebih selektif lagi dalam melakukan penyusunan anggaran untuk kegiatan PORPROV dan ketepatan dalam mengeksekusi program agar tidak terulang kejadian serupa yang mengakibatkan terjadinya pembengkakan anggaran. Selain dalam melakukan penganggaran harus mampu menganalisa kejadian-kejadian yang berpotensi akan timbul dalam pelaksanaan suatu kegiatan, misalnya kenaikan harga penginapan dan ketersediaan jumlah penginapan yang memadai.
- b. Dinas Pemuda dan olahraga sebagai pihak pelaksana kegiatan maupun program tertentu, memperbaiki kinerja organisasinya dalam melaksanakan perencanaan suatu kegiatan maupun program yang lebih akurat dan tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Mangkunegara. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ke Tujuh PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Creswell, J. W. 1998. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Darma, Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM.
- Gie, Liang The. 1999. *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Yogyakarta.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi*. Bandung: widya padjajaran
- Handoko, T. Hani. 1997. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Iswanto, Y. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: UT.
- Kurniawati, Susanti. 2010. *Kinerja Organisasi*. Jurnal Online.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mangkuprawira, Sjafri. 2007. *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Mulyadi. 2001. *Balanced Scorecard : Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Robbins, S.P. 1996. *Perilaku Organisasi : Edisi Bahasa Indonesia Jilid I & II*, PT Pringhalindo, Jakarta.

- Robbins, S.P. 2003. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Schermerhorn. 1996. *Management. John Wiley & Sons, New York, Fifth edition*.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia(Reformasi Birokrasi dan Manajemen PNS), Ed I*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawan, Wendy. 2014. *Evaluasi Kinerja Proyek dengan Pendekatan Weibullized - Earn Value*. Jurnal ITS. Malang
- Sudjarwo. 2008. *evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat ilV pada Balai Diklat Keagamaan Semarang*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Simanjuntak, payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: UI
- Sinambela, Lijan. (2012). *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV.Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sunyoto, Agus. 1999. *Kualitas Kinerja Aparatur*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibowo, 2011. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya manusia: Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba 4.

Peraturan Perundangan-Undangan dan Dokumen

Data dan atau Arsip Dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau Tahun 2015

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan WaliKota Lubuklinggau Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Lubuklinggau.



Catatan Lapangan 1 Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/tanggal : 24 Februari 2016

Jam : 10.15 WIB

Lokasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau

Sumber data : Kepala Dinas

Deskripsi data : **Perencanaan Anggaran Penunjang Kegiatan**

Informan adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau. pertanyaan yang disampaikan yaitu tentang perencanaan anggaran penunjang kegiatan.

Hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

Peneliti : Bagaimana anggaran untuk penyelenggaraan untuk kegiatan Porprov ini?

Informan : Anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut sudah cukup namun pada kenyataan dilapangan ada item-item yang memang bersifat fluktuatif seperti sewa penginapan yang mengalami perubahan harga, penutupan biata untuk sewa beberapa venue yang belum selesai dibangun,

Peneliti : Apa saja permasalahan yang membuat anggaran membengkak tersebut?

Informan : Selain itu juga terjadi penambahan jumlah unit yang tidak terduga sehingga ini menyulitkan bagi kami selaku koordinator dan pengawas untuk memberikan sarana yang cukup untuk para atlit dan official, ini merupakan hal-hal yang terjadi diluar kendali sebenarnya, terjadi begitu saja dari apa yang telah di rencanakan oleh tim panitia.

Informan

H. M. HIDAYAT ZAINI, S.Sos

Catatan Lapangan 2
Metode Pengumpulan Data : Wawancara

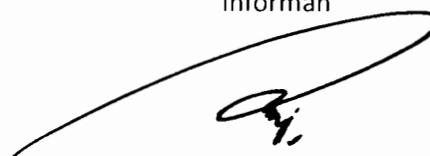
Hari/tanggal : 24 Februari 2016
Jam : 12.45 WIB
Lokasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau
Sumber data : Kepala Bidang Olahraga DISPORA
Deskripsi data : Pelaksanaan Porprov 2015

Informan adalah Kepala Bidang Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau. pertanyaan yang disampaikan yaitu tentang pelaksanaan Porprov 2015.

Hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

Peneliti : Bagaimana menurut bapak penyelenggaraan Porprov 2015 ini?
Informan : Kegiatan PORPROV tahun 2015 di lubuklinggau secara umum sukses terselenggara namun sukses terlaksananya kegiatan tersebut juga masih menghadapi masalah – masalah salah satu contoh pada saat penyelenggaraan cabang olahraga bilyar dan karate dimana sewa gedungnya ternyata belum termasuk sewa pendingin udaranya, sehingga kita harus mengeluarkan dana lagi untuk itu dan hal ini diluar sepengetahuan kami'

Informan



Drs. JON HERMAN, M.Pd

Catatan Lapangan 3 Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/tanggal : 25 Februari 2016
Jam : 12.45 WIB
Lokasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau
Sumber data : Kepala Bidang Olahraga DISPORA
Deskripsi data : Pelaksanaan Porprov 2015

Informan adalah Kepala Bidang Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau. pertanyaan yang disampaikan yaitu tentang pelaksanaan Porprov 2015.

Hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

Peneliti : Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan ini?
Informan : Salah satu masalah yang dihadapi pada penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau adalah terjadi pada saat penyelenggaraan cabang olahraga bilyar dan karate karena penyewaan gedung untuk pelaksanaan kedua cabang olahraga tersebut belum termasuk biaya sewa pendingin udaranya (AC) sehingga panitia penyelenggara harus mengeluarkan dana tambahan sebesar Rp. 7.500.000,- sebagai uang sewa pendingin udara (AC) yang belum masuk kedalam pos anggaran belanja'.

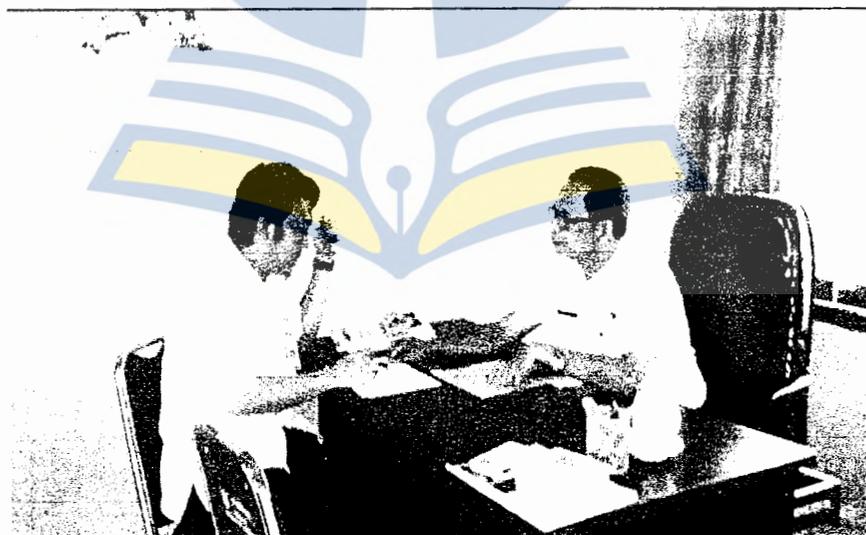
Informan



Drs. JON HERMAN, M.Pd



Wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau (*H.M. Hidayat Zaini, S.Sos*) pada tanggal 24 februari 2016 pukul 10:15 wib
Dokumen penulis, 2016.



Wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau (*Saparudin Husein, S.Sos*) pada tanggal 25 februari 2016 pukul 14:15 wib
Dokumen penulis, 2016.



Wawancara dengan Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau (*Drs. Jon Herman, M.Pd*) pada tanggal 25 february pukul 12:45 wib
Dokumen penulis, 2016.



Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana (*Aldino, SH*) pada tanggal 24 february 2016 puku 13:45 wib
Dokumen penulis, 2016.



Tampak depan dinas pemuda dan olahraga kota lubuklinggau
Dokumen penulis, 2016.



Tampak samping dinas pemuda dan olahraga kota lubuklinggau
Dokumen penulis, 2016.

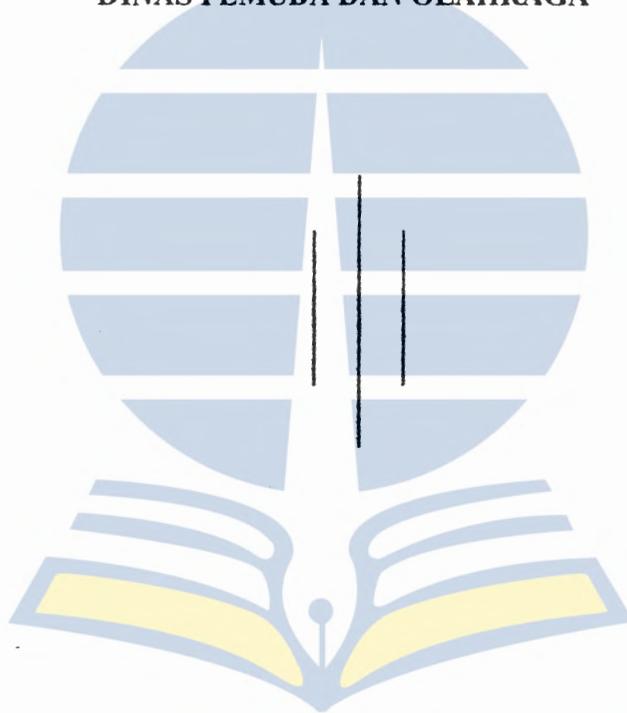


PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**



SALINAN



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007^{42603.pdf} tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional.
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB...

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pemuda dan olahraga serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana, kewirausahaan dan industri olahraga;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana, kewirausahaan dan industri olahraga;
- d. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
- e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pemuda, olahraga dan sarana dan prasarana, kewirausahaan dan industri olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang pemuda dan olahraga yang diserahkan oleh Walikota.

BAB...

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda; dan
 3. Seksi Kepemimpinan Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 1. Seksi Olahraga Pendidikan;
 2. Seksi Olahraga Prestasi; dan
 3. Seksi Olahraga Rekreasi.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Perawatan.
- f. Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, membawahkan :
 1. Seksi Kewirausahaan Pemuda; dan
 2. Seksi Industri Olahraga.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a peraturan ini mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana, kewirausahaan dan industri olahraga.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal...

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan administrasi keuangan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan

d. melaksanakan...

yang berlaku;

42603.pdf

- d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan secara periodik;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - e. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
 - g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di bidang pemuda dan olah raga;
 - j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

Pasal...

Pasal 10

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan kepemudaan, pengembangan organisasi pemuda, kepemimpinan pemuda, kaderisasi kepemudaan, pembangunan wawasan kebangsaan dan aktivitas pemuda serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan/perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang kepemudaan;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan pemberdayaan kepemudaan;
- e. penyelenggaraan urusan pengembangan organisasi kepemudaan;
- f. penyelenggaraan urusan pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan;
- c. melaksanakan kegiatan pemuda pelopor;
- d. melaksanakan seleksi pertukaran pemuda antar provinsi maupun antar Negara;
- e. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemulihan pemuda beresiko;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan...

- 42603.pdf
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun pedoman teknis pengembangan organisasi kepemudaan;
 - c. melaksanakan pembinaan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - d. meneliti dan memproses permohonan pemberian rekomendasi dalam rangka kegiatan kepemudaan;
 - e. monitor dan evaluasi kegiatan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Kepemimpinan Pemuda, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda;
- c. monitor dan evaluasi kegiatan pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda;
- d. meneliti dan memberikan rekomendasi dalam rangka kegiatan pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda;
- e. melaksanakan seleksi dan pelatihan paskibraka; dan
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran bela negara;

Bagian Keempat Bidang Keolahragaan

Pasal 13

Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pertimbangan, penyusunan, pelaksanaan, mengendalikan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pada Bidang Keolahragaan yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan...

- 42603.pdf
- a. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang keolahragaan;
 - b. pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga;
 - c. pengelolaan dan penyelenggaraan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi dibidang keolahragaan;
 - e. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
 - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - g. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - h. pengembangan dan peningkatan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
 - i. pengembangan manajemen olahraga;
 - j. pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
 - k. peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
 - l. pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
 - m. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga; dan
 - n. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ;
 - b. menyusun pedoman teknis olahraga pendidikan;
 - c. memfasilitasi kegiatan olahraga pelajar dan mahasiswa tingkat Kota, provinsi dan nasional;
 - d. melaksanakan pemusatan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - e. mengumpulkan data olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan unit terkait dalam penyelenggaraan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi...

(2) Seksi Olahraga Prestasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis olahraga prestasi;
- c. menyusun rencana analisa potensi olahraga prestasi;
- d. memfasilitasi pelaksanaan olahraga prestasi;
- e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Olahraga Rekreasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis olahraga rekreasi yaitu olahraga masyarakat, tradisional dan penyandang cacat;
- c. melakukan pemassalan dan pembibitan olahraga rekreasi;
- d. monitor dan evaluasi kegiatan pembibitan olahraga rekreasi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan olahraga rekreasi;
- f. mengembangkan olahraga rekreasi;
- g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 16

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, pengendalian dan pemanfaatan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan...

- 2603.pdf
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis dalam pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - d. penyelenggaraan pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. pemberian izin/rekomendasi penyelenggaraan pertandingan olahraga dan penggunaan sarana di bidang pemuda dan olahraga;
 - f. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 18

(1) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan merencanakan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- c. menginventarisasi pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan sarana olahraga;
- d. mengevaluasi pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengendalian dan Perawatan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;

b.menyusun...

- b. menyusun konsep pedoman teknis, standar, kriteria, dan prosedur pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- c. melakukan pemetaan kondisi dan proyeksi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- d. melakukan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- f. melakukan pembimbingan teknis pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- g. melakukan pengajuan usul penghapusan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang tidak layak digunakan;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan dan Perawatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga

Pasal 19

Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan, menganalisa, menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kreatifitas dan aktivitas pemuda;
- b. melaksanakan kegiatan kewirausahaan kepemudaan;

c. pembinaan...

- c. pembinaan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dibidang keolahragaan;
- d. pengembangan dan peningkatan kemitraan dengan pemerintah dan pihak swasta dalam pembangunan olahraga;
- e. pengembangan dan peningkatan kemitraan dengan pemerintah dan pihak swasta di bidang kewirausahaan pemuda;
- f. pembangunan dan pengembangan industri olahraga; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan dan menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang kewirausahaan pemuda;
- b. menyiapkan rancangan Peraturan perundang-undangan yang untuk peningkatan dan pengembangan kewirausahaan pemuda;
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait untuk pembinaan pemuda dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan;
- d. mengadakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan untuk pemuda;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Industri Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan dan menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang industri olahraga;
- b. melaksanakan pengembangan pengolahan data base di bidang pengolahan data;
- c. melaksanakan peliputan dan pembuatan dokumentasi sebagai bahan informasi yang diperlukan oleh instansi terkait maupun masyarakat untuk pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
- d. melakukan monitoring perkembangan olahraga dalam rangka menyiapkan data dan informasi di bidang pengolahan data;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB...

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 22

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 23

UPTD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 24

UPTD dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB...

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ASRON ERWADI SH. M Hum
PEMBINA / IV a
NIP. 19660806 198503 1 004



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKAP SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO RKAP SKPD :

1.18	01	01	20	06	5	2
------	----	----	----	----	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1	Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN	: 1.18	Pemuda dan Olah Raga
UNIT ORGANISASI	: 1.18 . 1.18.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga
SUB UNIT ORGANISASI	: 1.18 . 1.18.01 . 01	Dinas Pemuda dan Olah Raga
PROGRAM	: 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
KEGIATAN	: 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
LOKASI KEGIATAN	: Kota Lubuklinggau	
SUMBER DANA	:	
JUMLAH ANGGARAN	: 4.451.722.500,00	(Empat milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA : M. Hidayat Zaini, S.Sos.
NIP : 19640324 198710 1 001
JABATAN : Pengguna Anggaran

KODE REKUNING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
	- Penanggung Jawab (1 org x 4 bin)	4	org/bin	650.000,00	2.600.000,00	0	-	0,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)
	- Pembina (1 org x 4 bin)	4	org/bin	500.000,00	2.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Ketua (1 org x 4 bin)	4	org/bin	450.000,00	1.800.000,00	0	-	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua (4 org x 4 bin)	16	org/bin	400.000,00	6.400.000,00	0	-	0,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris (1 org x 4 bin)	4	org/bin	350.000,00	1.400.000,00	0	-	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)
	- Wakil Sekretaris (4 org x 4 bin)	16	org/bin	300.000,00	4.800.000,00	0	-	0,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- Kepala Bidang (10 org x 4 bin)	40	org/bin	300.000,00	12.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	- Anggota (100 org x 10 hari)	1.000	org/hari	150.000,00	150.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)
	- Pembantu Umum (50 org x 10 hari)	500	org/hari	100.000,00	50.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	Petugas Upacara Pembukaan / Penutupan			0,00	0,00			500.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
	✓ Petugas Pembawa Bendera Cabor dan Kontingen	0	-	0,00	0,00	80	org/kl	200.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
	✓ Petugas Kebersihan lap Upacara	0	-	0,00	0,00	20	org/kl	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	✓ Petugas Pendukung Acara Pembukaan dan Penutupan	0	-	0,00	0,00	50	org/kl	200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	Petugas Keamanan			850.000,00	165.500.000,00			0,00	0,00	(165.500.000,00)	(100,00)
	- Ketua (1 org x 10 hari)	10	org/hari	250.000,00	2.500.000,00	0	-	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua (2 org x 10 hari)	20	org/hari	250.000,00	5.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Koordinator (4 org x 10 hari)	40	org/hari	200.000,00	8.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Anggota (100 org x 10 hari)	1.000	org/hari	150.000,00	150.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)
	Petugas UPP			600.000,00	58.000.000,00			0,00	0,00	(58.000.000,00)	(100,00)
	- Ketua (1 org x 10 hari)	10	org/hari	200.000,00	2.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua (2 org x 10 hari)	20	org/hari	150.000,00	3.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Koordinator (2 org x 10 hari)	20	org/hari	150.000,00	3.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Anggota (50 org x 10 hari)	500	org/hari	100.000,00	50.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	Petugas Kesehatan			800.000,00	146.500.000,00			0,00	0,00	(146.500.000,00)	(100,00)
	- Ketua (1 org x 10 hari)	10	org/hari	250.000,00	2.500.000,00	0	-	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua (2 org x 10 hari)	20	org/hari	200.000,00	4.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Koordinator (10 org x 10 hari)	100	org/hari	200.000,00	20.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Anggota (80 org x 10 hari)	800	org/hari	150.000,00	120.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)
	Petugas Kebersihan			300.000,00	54.000.000,00			0,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)
	- Koordinator (2 org x 10 hari)	20	org/hari	200.000,00	4.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Anggota (50 g x 10 hari)	500	g/hari	100.000,00	50.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	Petugas Upacara Pembukaan/Penutupan			3.250.000,00	128.350.000,00			0,00	0,00	(128.350.000,00)	(100,00)

KODE REKUNING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Berubah (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
	- Perwira Upacara	4	org/kl	250.000,00	1.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Komandan Upacara	4	org/kali	250.000,00	1.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Pemimpin Barisan	36	org/kali	250.000,00	9.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Penanggung Jawab Defile	2	org/kali	250.000,00	500.000,00	0	-	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Pembawa Bendera Poprov/kontingen	8	org/kl	150.000,00	1.200.000,00	0	-	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Pembawa Papan Kontingen/wasit	36	org/kl	150.000,00	5.400.000,00	0	-	0,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
	- Pembaca Janji Wasit	2	org/kl	250.000,00	500.000,00	0	-	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Pembawa Janji Atr	2	org/kl	250.000,00	500.000,00	0	-	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Pemandu Barisan Kontingen	17	org/kl	250.000,00	4.250.000,00	0	-	0,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)
	- Pembaca Do'a	2	org/kl	250.000,00	500.000,00	0	-	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- MC	2	org/kl	250.000,00	500.000,00	0	-	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Pembawa Api obor	2	org/kl	250.000,00	500.000,00	0	-	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Pengatur acara	2	org/kl	250.000,00	500.000,00	0	-	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Peserta senam Massal	2.000	org/kl	50.000,00	100.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	- Instruktur senam masal	20	org/kl	150.000,00	3.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			0,00	0,00			1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber			0,00	0,00			1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli Perencana dan Pengawas			0,00	0,00			1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	- Pengawas	0		0,00	0,00	3	bulan/org	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	- Perencana	0		0,00	0,00	2	org/bulan	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			603.928.000,00	4.262.750.000,00			986.326.500,00	3.540.412.500,00	(722.337.500,00)	(16,95)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			20.008.000,00	28.000.000,00			50.008.000,00	54.000.000,00	26.000.000,00	92,86
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			20.000.000,00	20.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)
	Alat Tulis Kantor			20.000.000,00	20.000.000,00			0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Alat Tulis Kantor	1	keg	20.000.000,00	20.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Alat Tulis Kantor			0,00	0,00			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	- ATK	0		0,00	0,00	1	pkt	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)			0,00	0,00			45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
	Belanja alat listrik dan Elektronik			0,00	0,00			45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
	- Belanja Alat Listrik Penerangan Lampu pada Tempat Pertandingan	0		0,00	0,00	1	ls	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			8.000,00	8.000.000,00			8.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
	Belanja Bahan Bakar Minyak/GAS			8.000,00	8.000.000,00			8.000,00	4.000.000,0	(4.000.000,00)	(50,00)
	- Belanja BBM Mobil Transport Kegiatan	1.000	liter	8.000,00	8.000.000,00	0		0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Belanja BBM Mobil Transport Kegiatan dan BBM Genset	0	-	0,00	0,00	500	liter	8.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			205.000.000,00	205.000.000,00			591.950.000,00	1.070.800.000,00	865.800.000,00	422,34
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Liputan/Publikasi/Mass Media			70.000.000,00	70.000.000,00			25.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	42,86
	Belanja Jasa Liputan/ Publikasi/ Mass Media			70.000.000,00	70.000.000,00			25.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	42,86
	- Belanja Media massa	1	keg	10.000.000,00	10.000.000,00	0		0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Belanja Media massa Lokal dan Regional Wilayah Lubuklinggau	0	-	0,00	0,00	4	media	25.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	- Publikasi	1	keg	15.000.000,00	15.000.000,00	0		0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Media Elektronik	1	keg	45.000.000,00	45.000.000,00	0		0,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Event Organizer			135.000.000,00	135.000.000,00			560.000.000,00	620.000.000,00	485.000.000,00	359,26
	Belanja Jasa Event organizer			135.000.000,00	135.000.000,00			0,00	0,00	(135.000.000,00)	(100,00)
	- Belanja Jasa Desain Maskot dan Logo	1	pkt	10.000.000,00	10.000.000,00	0		0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Belanja Jasa Artis	1	pkt	125.000.000,00	125.000.000,00	0		0,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Jasa Event organizer Tambahan Pembukaan dan Penutupan Porprov			0,00	0,00			60.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
	- Belanja Kembang Api	0	-	0,00	0,00	2	kg	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	- Belanja Jasa Hiburan Band Lokal	0	-	0,00	0,00	2	kg	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	- Belanja Jasa Instruktur Senam Pembukaan/Penutupan dari Jakarta	0	-	0,00	0,00	2	kg	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Event Organizer (Marching Band Nasional)			0,00	0,00			400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
	- Belanja Jsa Event Organizer (Marching Band Nasional)	0	-	0,00	0,00	1	pkt	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Event Organizer Pembuatan Senam Linggau			0,00	0,00			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	- Jasa Pembuatan Senam Linggau dan Kelengkapannya	0	-	0,00	0,00	1	pkt	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber			0,00	0,00			6.950.000,00	350.800.000,00	350.800.000,00	0,00
	Instruktur senam dan Peserta Senam Pembukaan / Penutupan			0,00	0,00			5.150.000,00	111.400.000,00	111.400.000,00	0,00
	Preserta senam Massal (500 org x 2 kali)	0	-	0,00	0,00	2.000	org/kl	50.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BIDANG LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
	✓ - Instruktur senam masal	0	-	0,00	0,00	14	org/kl	100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	✓ - Instruktur Senam Masal Dari Jakarta	0	-	0,00	0,00	2	org/kl	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	✓ Belanja Jasa Bongkar pasang Sarana dan Prasarana Pendukung Porprov			0,00	0,00			550.000,00	29.400.000,0	29.400.000,00	0,00
	- Jasa Bongkar Pasang Sarana dan Prasarana Atletik	0	-	0,00	0,00	20	org/kl	150.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	- Jasa Bongkar Pasang Sarana dan Prasarana Senam	0	-	0,00	0,00	40	org/kl	200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	- Jasa Bongkar Pasang Sarana dan Prasarana Tinju	0	-	0,00	0,00	20	org/kl	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	- Jasa Bongkar Pasang Saranan dan Prasarana Panjat Tebing	0	-	0,00	0,00	10	org/kl	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	- Jasa Bongkar Pasang Sarana dan Prasarana Tenis Meja	0	-	0,00	0,00	10	org/kl	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	- Jasa Bongkar Pasang Sarana dan prasarana Sepak Takraw	0	-	0,00	0,00	12	org/kl	200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	- Jasa Bongkar Pasang Sarana dan prasarana Karate dan Taekwondo	0	-	0,00	0,00	20	org/kl	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	- Jasa Bongkar Pasang Sarana dan Prasana Billiard	0	-	0,00	0,00	20	org/kl	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli Panitia Lokal			0,00	0,00			100.000,00	105.000.000,0	105.000.000,00	0,00
	✓ Tenaga Ahli Panitia Lokal	0	-	0,00	0,00	1.050	hr/org	100.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
	Jasa Keamanan Kegiatan			0,00	0,00			150.000,00	105.000.000,0	105.000.000,00	0,00
	✓ - Jasa Keamanan	0	-	0,00	0,00	700	org/hr	150.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi			35.000.000,00	35.000.000,00			0,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa			35.000.000,00	35.000.000,00			0,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Premi Asuransi Jiwa			35.000.000,00	35.000.000,00			0,00	0,0	(35.000.000,00)	(100,00)
	- Belanja Asuransi Atlit dan Panitia	1	keg	35.000.000,00	35.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			58.350.000,00	185.000.000,00			33.200.000,00	97.100.000,00	(87.900.000,00)	(47,51)
5.2.2.06.07	Belanja Cetak dan Penggandaan Lainnya			58.350.000,00	185.000.000,00			33.200.000,00	97.100.000,00	(87.900.000,00)	(47,51)
	Belanja cetak dan penggandaan lainnya			58.350.000,00	185.000.000,00			33.200.000,00	97.100.000,0	(87.900.000,00)	(47,51)
	- Spanduk	75	lbr	300.000,00	22.500.000,00	25	lbr	300.000,00	7.500.000,00	(15.000.000,00)	(66,67)
	- Umbul-Umbul dan Tiang	150	unit	250.000,00	37.500.000,00	100	unit	200.000,00	20.000.000,00	(17.500.000,00)	(46,67)
	- Baleho	15	lbr	2.000.000,00	30.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Baleho ukuran 10 meter x 5 meter	0	-	0,00	0,00	5	lbr	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	- Banner	50	lbr	300.000,00	15.000.000,00	23	lbr	200.000,00	4.600.000,00	(10.400.000,00)	(69,33)
	- Balon udara besar	1	set	30.000.000,00	30.000.000,00	1	set	20.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKONING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5.2.2.07	- Perlengkapan Upacara	1	pkt	15.000.000,00	15.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- One way	10	lbr	500.000,00	5.000.000,00	10	lbr	500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- Branding Mobil	2	unit	5.000.000,00	10.000.000,00	2	unit	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Back Drop	4	lbr	5.000.000,00	20.000.000,00	4	lbr	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			220.000.000,00	220.000.000,00			237.500.000,00	237.500.000,00	17.500.000,00	7,95
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			220.000.000,00	220.000.000,00			237.500.000,00	237.500.000,00	17.500.000,00	7,95
	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat			220.000.000,00	220.000.000,00			237.500.000,00	237.500.000,00	17.500.000,00	7,95
	- Sewa Hotel Panitia	1	keg	200.000.000,00	200.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa tempat pertandingan	1	keg	20.000.000,00	20.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa tempat pertandingan Cabor Bridge	0	-	0,00	0,00	1	keg	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	- Sewa Tempat Penginapan Panitia ✓	0	-	0,00	0,00	1	keg	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	- Sewa Tempat Pertandinan Cabor Catur	0	-	0,00	0,00	1	keg	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	- Sewa Tempat Pertandingan Cabor Senam	0	-	0,00	0,00	1	keg	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	- Sewa Tempat Pertandingan Cabor Karate dan Taekwondo	0	-	0,00	0,00	1	keg	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	- Sewa Tempat Pertandingan Cabor Billiard	0	-	0,00	0,00	1	keg	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			0,00	0,00			250.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			0,00	0,00			250.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
	Sewa Kendaraan Saat Kegiatan			0,00	0,00			250.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
	- Sewa Kendaraan Operasional Kegiatan	0	-	0,00	0,00	168	mobil/hr	250.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			63.400.000,00	174.500.000,00			65.361.000,00	299.000.000,00	124.500.000,00	71,35
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi			0,00	0,00			11.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	Belanja Sewa Meja Kursi di tempat pertandingan			0,00	0,00			11.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	- Meja	0	-	0,00	0,00	600	unit	10.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	- Kursi	0	-	0,00	0,00	3.000	unit	1.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer			0,00	0,00			1.500.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
	Sewa Komputer dan Printer Tempat Pertandingan			0,00	0,00			1.500.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
	- Sewa Komputer dan Printer Tempat Pertandingan	0	-	0,00	0,00	24	set	1.500.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator			0,00	0,00			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	Belanja Sewa Generator			0,00	0,00			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	- Sewa Genset di tempat pertandingan	0		0,00	0,00	1	keg	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda			1.900.000,00	20.000.000,00			400.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Sewa tenda			1.900.000,00	20.000.000,00			0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa tenda	20	unit	400.000,00	8.000.000,00	0		0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Tenda full	8	set	1.500.000,00	12.000.000,00	0		0,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
	Sewa tenda Pembukaan/Penutupan dan di tempat Pertandingan			0,00	0,00			400.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	- Sewa tenda	0		0,00	0,00	100	unit	400.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Soundsystem			31.500.000,00	94.500.000,00			25.000.000,00	160.000.000,00	65.500.000,00	69,31
	Sewa sound system			31.500.000,00	94.500.000,00			25.000.000,00	160.000.000,00	65.500.000,00	69,31
	- Sewa sound system tempat pertandingan,	23	unit	1.500.000,00	34.500.000,00	24	unit	5.000.000,00	120.000.000,00	85.500.000,00	247,83
	- Sewa musik	2	kl	30.000.000,00	60.000.000,00	2	kl	20.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000,00)	(33,33)
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi, Panggung dan Perlengkapannya			30.000.000,00	60.000.000,00			18.200.000,00	26.500.000,00	(33.500.000,00)	(55,83)
	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Umum di Tempat Pertandingan			0,00	0,00			18.200.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
	- Sewa AC Tempat Pertandingan Senam	0		0,00	0,00	14	bh/hr	500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	- Sewa Karpet Penutup Lantai Cabor Senam	0		0,00	0,00	1	pkt	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	- Sewa Pagar Pembatas Cabor Karate, Pencak Silat, dan Taekwondo	0		0,00	0,00	1	ls	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	- Sewa Kipas Angin Cabor Tinju	0		0,00	0,00	10	bh/hr	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Sewa panggung dan perlengkapannya			30.000.000,00	60.000.000,00			0,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Panggung rigging	2	kl	30.000.000,00	60.000.000,00	0		0,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.13	Belanja Sewa Peralatan Studio dan Komunikasi			0,00	0,00			250.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	Sewa Alat Komunikasi			0,00	0,00			250.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	- Sewa HT	0		0,00	0,00	30	unit	250.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			145.000,00	1.723.750.000,00			117.500,00	1.139.312.500,00	(584.437.500,00)	(33,91)
5.2.2.11.09	Belanja Konsumsi			145.000,00	1.723.750.000,00			117.500,00	1.139.312.500,00	(584.437.500,00)	(33,91)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
	Belanja Konsumsi			145.000,00	1.723.750.000,00			117.500,00	1.139.312.500,0	(584.437.500,00)	(33,91)
	- Snack Pembukaan dan Penutupan	2.000	ktk	10.000,00	20.000.000,00	1.500	ktk	7.500,00	11.250.000,00	(8.750.000,00)	(43,75)
	- Snack Selama Kegiatan	12.075	ktk/cabor/hr	10.000,00	120.750.000,00	12.075	ktk/cabor/hr	7.500,00	90.562.500,00	(30.187.500,00)	(25,00)
	- Makan Panitia Selama Kegiatan	4.200	ktk/kl/hr	30.000,00	126.000.000,00	3.500	ktk/kl/hr	25.000,00	87.500.000,00	(38.500.000,00)	(30,56)
	- Konsumsi Ramah tamah	2.000	porsi/kl	30.000,00	60.000.000,00	2.000	porsi/kl	25.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)
	- Makan Malam Peserta dan Panitia	45.500	porsi/hr	30.000,00	1.365.000.000,00	35.000	porsi/hr	25.000,00	875.000.000,00	(490.000.000,00)	(35,90)
	- Air mineral selama kegiatan	800	dus	25.000,00	20.000.000,00	800	dus	20.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)
	- Konsumsi rapat dan pertemuan teknis	1.200	ktk/kl	10.000,00	12.000.000,00	1.200	ktk/kl	7.500,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)
5.2.2.14	Belanja Pakailan khusus dan hari-hari tertentu			1.900.000,00	1.263.000.000,00			350.000,00	282.500.000,00	(980.500.000,00)	(77,63)
5.2.2.14.04	Belanja Pakailan Olahraga			1.900.000,00	1.263.000.000,00			350.000,00	282.500.000,00	(980.500.000,00)	(77,63)
	Belanja Pakailan Olahraga			1.900.000,00	1.263.000.000,00			0,00	0,00	(1.263.000.000,00)	(100,00)
	- Baju Kemeja Panitia	600	lbr	200.000,00	120.000.000,00	0		0,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)
	- Seragam Pesenam Massal	1.010	lbr	100.000,00	101.000.000,00	0		0,00	0,00	(101.000.000,00)	(100,00)
	- Baju Kaos Panitia	600	lbr	100.000,00	60.000.000,00	0		0,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)
	- Topi	600	lbr	50.000,00	30.000.000,00	0		0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Training Pack	600	set	750.000,00	450.000.000,00	0		0,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)
	- Sepatu	600	psg	500.000,00	300.000.000,00	0		0,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)
	- Sepatu Pesenam Massal	1.010	psg	200.000,00	202.000.000,00	0		0,00	0,00	(202.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Pakailan Olahraga Instruktur senam dan Peserta Senam Masal			0,00	0,00			250.000,00	252.500.000,0	252.500.000,00	0,00
	- Baju Peserta dan Instruktur Senam Masal (Kaos, Celana Training, Topi, dan Sepatu)	0		0,00	0,00	1.010	set	250.000,00	252.500.000,00	252.500.000,00	0,00
	Belanja Pakailan Panitia Lokal Daerah			0,00	0,00			100.000,00	30.000.000,0	30.000.000,00	0,00
	- Belanja Pakailan Panitia Lokal Daerah	0		0,00	0,00	300	pcs	100.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			75.000,00	178.500.000,00			40.000,00	60.700.000,00	(117.800.000,00)	(65,99)
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			75.000,00	178.500.000,00			40.000,00	60.700.000,00	(117.800.000,00)	(65,99)
	Belanja Perjalanan Dalam Daerah			75.000,00	178.500.000,00			40.000,00	60.700.000,0	(117.800.000,00)	(65,99)
	- Transport Peserta Senam Masal	7.000	org/hr	25.000,00	175.000.000,00	4.000	org/hr	15.000,00	60.000.000,00	(115.000.000,00)	(65,71)
	- Transport Instruktur Senam Masal	70	org/hr	50.000,00	3.500.000,00	28	org/hr	25.000,00	700.000,00	(2.800.000,00)	(80,00)
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi			0,00	0,00			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan			0,00	0,00			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
	Belanja Jasa Perencanaan dan Desain Maskot Porprov			0,00	0,00			7.500.000,00	7.500.000,0	7.500.000,00	0,00
	- Jasa Desain Maskot dan Logo Porprov	0	-	0,00	0,00	1	pkt	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga			50.000,00	250.000.000,00			50.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat			50.000,00	250.000.000,00			50.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat			50.000,00	250.000.000,00			50.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	- Pengadaan Maskot Porprov yg akan diserahkan kepada pemenang	5.000	bh	50.000,00	250.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)
	- Pengadaan Souvenir Maskot Porprov yg akan diserahkan kepada pemenang	0	-	0,00	0,00	5.000	bh	50.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal			750.000,00	18.750.000,00			507.440.000,00	880.810.000,00	862.060.000,00	4.597,65
5.2.3.43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika			750.000,00	18.750.000,00			53.990.000,00	188.610.000,00	169.860.000,00	905,92
5.2.3.43.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum			750.000,00	18.750.000,00			53.990.000,00	188.610.000,00	169.860.000,00	905,92
	Belanja barang Peralatan Umum			0,00	0,00			43.490.000,00	166.610.000,00	166.610.000,00	0,00
	- Pengadaan Tangga Juara	0	-	0,00	0,00	23	unit	500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
	- Scoring Board Tenis Lapangan	0	-	0,00	0,00	3	bh	1.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	- Pembuatan Star Finish Sepeda	0	-	0,00	0,00	1	ls	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	- Triplek 10 mill untuk cabor Sepak Takraw	0	-	0,00	0,00	450	keping/lapan	150.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00
	- Bench Cadangan Cabor Sepakbola	0	-	0,00	0,00	4	unit	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	- Bench PP Cabor Sepakbola	0	-	0,00	0,00	2	unit	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	- Dispenser disetup Tempat Pertandingan	0	-	0,00	0,00	46	unit	250.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
	- Karpas Penutup Sepak Takraw	0	-	0,00	0,00	1	ls	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	- Ring Hop Sepak Takraw	0	-	0,00	0,00	3	unit	2.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	- Pagar Pembatas Billiard	0	-	0,00	0,00	1	ls	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	- Score Table Billiard	0	-	0,00	0,00	8	set	250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	- Score Table Sepak Takraw	0	-	0,00	0,00	4	set	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	- Papan Penunjam Tempat Pertandingan	0	-	0,00	0,00	23	buah	200.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
	- Box Es Tenis Lapangan	0	-	0,00	0,00	4	bh	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	- Box Es Voli Pasir	0	-	0,00	0,00	2	bh	200.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	- Payung Besar Tenis Lapangan	0	-	0,00	0,00	8	bh	150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KELOMPOK BUDIDAYA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah / (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
	- Payung Besar Panjat Tebing	0	-	0,00	0,00	3	bh	150.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	- Payung Besar Voli Pasir	0	-	0,00	0,00	4	bh	150.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	- Terpal Lapangan Outdoor Sepak Takraw	0	-	0,00	0,00	1	pkt	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	- Terpal Penutup Atap Senam	0	-	0,00	0,00	1	pkt	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	- Hordeng Gedung Sepak Takraw	0	-	0,00	0,00	1	pkt	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	- Kain Sekat Lapangan Cabor Tenis Lapangan	0	-	0,00	0,00	2	pkt	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	- Galon dan Isi	0	-	0,00	0,00	64	bh	30.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
	- Sarung Tangan Cabor Billiard	0	-	0,00	0,00	14	set	10.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	- Tedmond di Lokasi Pertandingan	0	-	0,00	0,00	4	bh	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	- Papan Penunjuk Jalan Cabor sepeda	0	-	0,00	0,00	1	set	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	- Stop Watch	0	-	0,00	0,00	30	unit	100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	- Box Es Panjat Tebing	0	-	0,00	0,00	2	bh	200.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	- Lonceng Panjat Tebing	0	-	0,00	0,00	4	bh	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	- Magnesium KArbonat Panjat Tebing	0	-	0,00	0,00	7	kg	100.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	- Bor Elektrik Panjat Tebing	0	-	0,00	0,00	2	unit	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	Belanja Moda Peralatan Umum			750.000,00	18.750.000,00			0,00	0,0	(18.750.000,00)	(100,00)
	- Pengadaan Tangga Juara	25	unit	750.000,00	18.750.000,00	0	-	0,00	0,00	(18.750.000,00)	(100,00)
	Belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap			0,00	0,00			10.500.000,00	22.000.000,0	22.000.000,00	0,00
	- Pembelian Air untuk di setiap tempat pertandingan	0	-	0,00	0,00	1	keg	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	- Pertengkapan Umum Tempat Pertandingan (Lap, Pel, Handuk Kecil dan sapu)	0	-	0,00	0,00	24	set	500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja			0,00	0,00			375.000.000,00	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga			0,00	0,00			375.000.000,00	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Pembangunan Sarana Olahraga Voli Pasir			0,00	0,00			50.000.000,00	50.000.000,0	50.000.000,00	0,00
	- Pembuatan Lapangan Voli Pasir	0	-	0,00	0,00	1	ls	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Pembangunan Saranan dan Prasarana Atletik			0,00	0,00			200.000.000,00	200.000.000,0	200.000.000,00	0,00
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Atletik	0	-	0,00	0,00	1	ls	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	Pengadaan Locker Room Kolam Renang dan Sarana Pendukung Kolam			0,00	0,00			80.000.000,00	100.000.000,0	100.000.000,00	0,00

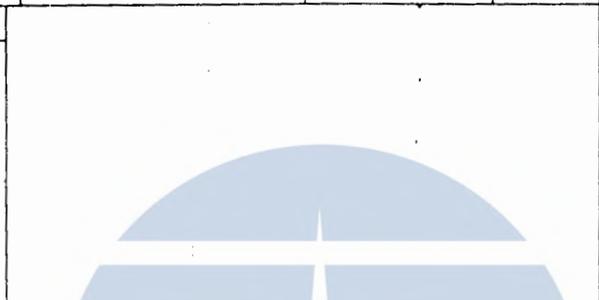
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
	Renang										
	- AC	0	-	0,00	0,00	5	unit	5.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	- Locker Room	0	-	0,00	0,00	1	set	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	- Meubeler	0	-	0,00	0,00	1	pkt	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	- Tiang Jarak	0	-	0,00	0,00	1	pkt	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Belanja Pengecetan Sarana Olahraga			0,00	0,00			45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
	- Pengecetan Lantai Lap Tenis Lapangan	0	-	0,00	0,00	1	ls	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	- Pengecetan Lantai Lap Basket	0	-	0,00	0,00	1	ls	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya			0,00	0,00			78.450.000,00	297.200.000,00	297.200.000,00	0,00
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya			0,00	0,00			78.450.000,00	297.200.000,00	297.200.000,00	0,00
	Belanja Pengadaan Alat Olahraga Lainnya			0,00	0,00			78.450.000,00	297.200.000,00	297.200.000,00	0,00
	- Matras Karate, Pencak Silat, Taekwondo, Kempo, dan Wushu	0	-	0,00	0,00	5	set	35.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
	- Net Tenis Lapangan	0	-	0,00	0,00	3	bh	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	- Meja Tenis Meja	0	-	0,00	0,00	4	bh	2.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	- Net Tenis Meja	0	-	0,00	0,00	2	bh	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	- Jaring Gawang Sepak Bola	0	-	0,00	0,00	4	bh	700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
	- Net Bola Voli	0	-	0,00	0,00	2	bh	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	- Net voli Pasir	0	-	0,00	0,00	2	bh	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	- Ring Basket	0	-	0,00	0,00	2	bh	200.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	- Net Bulu Tangkis	0	-	0,00	0,00	2	bh	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	- Meja Billiard	0	-	0,00	0,00	1	unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	- Papan Catur	0	-	0,00	0,00	50	set	250.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
	- Jam Catur	0	-	0,00	0,00	50	unit	500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	- Biding Card (Plastik) Bridge	0	-	0,00	0,00	3	unit	1.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	- Board Bridge	0	-	0,00	0,00	5	unit	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	- Plastik Computer Card	0	-	0,00	0,00	3	dus	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	- Sasaran Tembak	0	-	0,00	0,00	1	pkt	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	- Tali Carmentel Panjat Tebing Dinamis 2 roll dan Statis 2 roll	0	-	0,00	0,00	4	roll	4.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
	- Point Panjat Tebing	0	-	0,00	0,00	5	set	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN		
Triwulan I	Rp	4.451.722.500,00
Triwulan II	Rp	0,00
Triwulan III	Rp	0,00
Triwulan IV	Rp	0,00
Jumlah	Rp	4.451.722.500,00



Bukittinggi, 15 Februari 2015
 Pengguna Anggaran
M. Nidayat Zaini, S.Sos.
 NIP. 19640324 198710 1 001

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 101 /KPTS/DISPORA/2015

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA
PROVINSI (PORPROV) KE X TAHUN 2015 DI KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pekan olah raga provinsi (porprov) ke X tahun 2015 di Kota Lubuklinggau perlu menetapkan tim koordinas penyelenggaraan kegiatan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kota Lubuklinggau Sebagai Tuan Rumah Pekan Olah Raga Provinsi ke X 2015 dan Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penunjukan Walikota Lubuklinggau sebagai Ketua Pelaksana Pekan Olah Raga Provinsi ke X Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi ke X Tahun 2015 di Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);